

RENCANA PENGELOLAAN SUBLANSKAP

Patimpeng Kahu

Pemerintah Kabupaten Bone

2026

RENCANA PENGELOLAAN SUBLANSKAP

Patimpeng Kahu

Tim Penulis (Kelompok Kerja Bentang Lahan)

A. Yusuf, S.IP., M.H.
Syamsidar, S.Pi., M.Si.
Ir. A. Hendra Setiawan, S.Pt., M.Si, IPM
Sutamin, S.P., M.Si.
Andi Takdir, S.T., M.Si.
Akifah Akhsa, S.P. M.Si.
Ikhwan Djufri, S.TP., M.Si.
Arham, S.T., M.Si.
Andi Erniana, S.H., M.Si.
Nurkaya, S.Sos., M.Si.
Andi Zulkifly Mallingkaan, S.T., M.Si.
Dr. Ade Fariq Ashar, S.STP., M.Si.

Tim Teknis (ICRAF Indonesia)

Ira Ratna Sari
Hikmah Fajar Assiddiq
Seruni Fauzia Lestari
M. Fikri Fadhillah
Erlangga
Thifali Adzani
Caecilia Novia
Nur Amin Syafri
Erni
Sumilia
Hamsir
Junaidi Hutasuhut
M. Syahrir
Suyanto
Ni'matul Khasanah
Feri Johana
Andree Ekadinata
Sonya Dewi

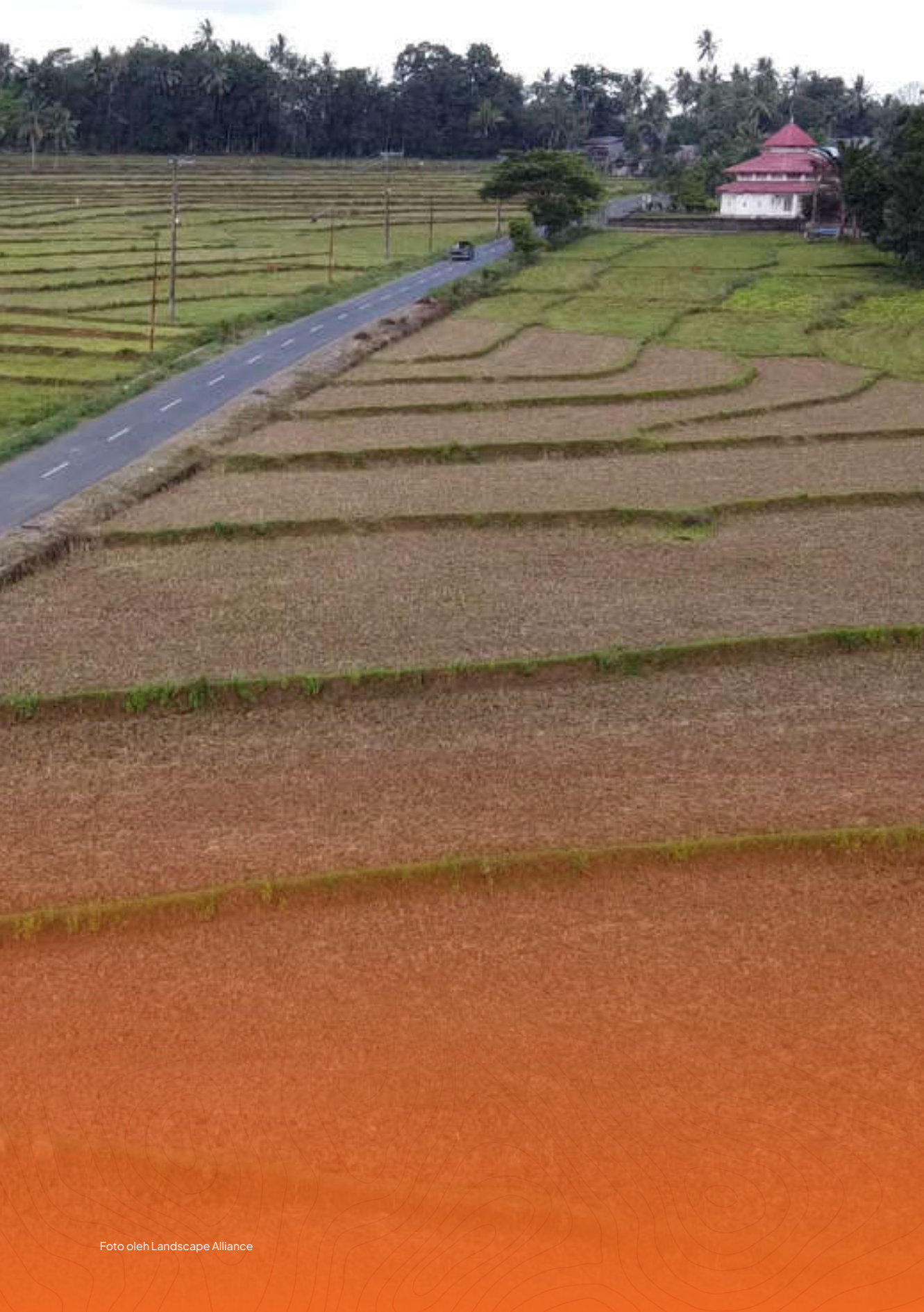


Foto oleh Landscape Alliance

Kata Pengantar
Bupati Bone

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen **Manajemen Plan Lanskap Patimpeng** ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Dalam dinamika perubahan lanskap yang terus berlangsung, perencanaan pengelolaan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, Manajemen Plan ini diharapkan mampu menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan **Lanskap Patimpeng dengan Alam Terjaga, Bencana Berkurang dan Masyarakat Sejahtera.**

Dokumen ini juga sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bone yaitu Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta menjadi bagian integral dari upaya bersama dalam merancang masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Harapan kami, rencana-rencana yang telah dirumuskan dalam dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan kolaboratif.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya Kelompok Kerja Lahan untuk Kehidupan Kabupaten Bone, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyusun dokumen ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para mitra pembangunan yang telah memberikan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kontribusi lainnya hingga dokumen ini terselesaikan.

Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang bermanfaat dan dapat mendorong langkah-langkah nyata menuju pengelolaan lanskap yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Bone.

Watampone, Juli 2025
Bupati Bone

H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M.



Foto oleh Landscape Alliance

Ringkasan Utama

Rencana Pengelolaan Sub-lanskap Patimpeng merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bijaksana. Rencana pengelolaan lanskap ini mengarahkan alokasi ruang di sub-lanskap Patimpeng sesuai dengan Visi bersama yang telah disepakati, yaitu alam terjaga, bencana berkurang dan masyarakat sejahtera, dengan menawarkan beragam pendekatan untuk meningkatkan ketahanan lanskap dengan solusi berbasis alam.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sub-lanskap merupakan upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan di Sub-lanskap Patimpeng. Rencana ini merupakan hasil dari proses diskusi yang dihadiri dan disepakati bersama oleh perwakilan dari Desa Massila, Desa Latellang, Desa Masago, Kelurahan Palattae, Kecamatan Patimpeng, KPH Ulubila, BUMDES Masila, Petani Masila Dinas TPHP, Dinas Pengendalian Penduduk, dan Bappeda Kabupaten Bone.

Menuju pencapaian Visi Pengelolaan Sub-lanskap Patimpeng, proses kolaboratif penyusunan Rencana Pengelolaan Sub-lanskap menghasilkan tiga strategi utama, yaitu: 1) Pengembangan praktik budidaya unggul, 2) Peningkatan akses lahan untuk penghidupan, dan 3) Peningkatan akses air. Setiap strategi pengelolaan Sub-lanskap Patimpeng memiliki serangkaian indikator, target, dan pemangku kepentingan penanggungjawab sebagai wujud pemantauan dan evaluasi secara partisipatif. Misal pada penentuan target pengembangan praktik budidaya unggul ditargetkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat 25% pada tahun 2035 melalui pengembangan komoditas durian, kakao, mangga, cengkeh dan kelapa.

Sub-lanskap Patimpeng memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan. Rencana pengelolaan ini disertai dengan model bisnis yang mendukung, yakni model bisnis agroforestri berbasis jagung.

Keberhasilan implementasi strategi-strategi pada Rencana Pengelolaan Sub-lanskap Patimpeng sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta. Selain itu, upaya mengintegrasikan rencana ini ke dalam kebijakan pengelolaan yang lebih luas, seperti dokumen RPJMD dan rencana sektoral lainnya, menjadi langkah yang krusial. Terakhir, kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan juga berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan alternatif, guna mewujudkan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.



Foto oleh Landscape Alliance

Daftar Isi

Kata Pengantar Bupati Bone iii
Ringkasan Utama v
01. Latar Belakang 1

1.1. Apa itu Rencana Pengelolaan Sub-Lanskap? 1
1.2. Di Mana Lokasi Sub-Lanskap Patimpeng? 2
1.3. Metode Perencanaan Sub-Lanskap 2
1.4. Proses Pengembangan Rencana 5

02. Profil Lanskap Patimpeng 7

2.1. Gambaran Umum 7
2.2. Penggunaan Lahan 8
2.3. Sosial Ekonomi 9
2.4. Permasalahan Sub-Lanskap Patimpeng 9

03. Visi Harapan Pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng 11

3.1. Visi Pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng 11

04. Harapan Pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng 13

4.1. Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Tantangan Dalam Pengelolaan Lanskap Patimpeng 13

05. Strategi Intervensi dan Rencana Ruang Pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng 15

5.1. Strategi Intervensi Pengelolaan Sub-Lanskap 15
5.2. Rencana Alokasi Ruang 17
5.3. Rencana Pengelolaan 19
5.4. Peta Intervensi 24

06. Pengembangan Usaha Berbasis Sub-Lanskap Berkelanjutan dan Potensi Lokal melalui Pendekatan Model Bisnis Terintegrasi Agroforestri berbasis Jagung 25

6.1. Pengembangan Usaha Berbasis Sub-Lanskap Berkelanjutan dan Potensi Lokal melalui Pendekatan Model Bisnis Terintegrasi Agroforestri Jagung 26
6.2. Rancangan Model Bisnis 28
6.3. Analisis Profitabilitas 31

07. Sistem Pemantauan dan Evaluasi 39
08. Penutup 45
Lampiran 49



Foto oleh Landscape Alliance

Daftar Gambar, Tabel, dan Kotak

Gambar

Gambar 1. Lokasi enam sub lanskap di Bone 3
Gambar 2. Metode yang digunakan dalam perencanaan lanskap 4
Gambar 3. Bagan proses pengembangan rencana pengelolaan lanskap 6
Gambar 4. Dinamika perubahan penggunaan lanskap Patimpeng Kahu (1990–2023) 8
Gambar 5. Visi dan Harapan Masyarakat di Sub-Lanskap Patimpeng 12
Gambar 6. Strategi Pengelolaan Lanskap Patimpeng 17
Gambar 7. Peta rencana alokasi ruang Patimpeng 18
Gambar 8. Rantai Hasil Strategi 1 20
Gambar 9. Lokasi Intervensi Strategi 1 20
Gambar 10. Rantai Hasil Strategi 2 21
Gambar 11. Lokasi intervensi strategi 2 22
Gambar 12. Rantai Hasil Strategi 3 23
Gambar 13. Lokasi intervensi strategi 3 23
Gambar 14. Peta intervensi Patimpeng 24
Gambar 15. Gambar . Model bisnis agroforestri berbasis jagung 29
Gambar 16. Indikator performa ekonomi yang digunakan 31

Tabel

Tabel 1. Luas Area Lanskap Patimpeng Kahu 2
Tabel 2. Komposisi Sistem Usaha Tani Agroforestri Berbasis Jagung dan Buah-Buahan 32
Tabel 3. Kebutuhan Tenaga Kerja dan Input Produksi 32
Tabel 4. Kebutuhan Biaya Tahunan dan Total Biaya Selama 30 Tahun 35
Tabel 5. Produktivitas Sistem Usaha Tani 36
Tabel 6. Indikator performa ekonomi 36
Tabel 7. Monitoring dan evaluasi strategi 1– Praktik Budidaya Unggul 40
Tabel 8. Monitoring dan evaluasi strategi 2 42
Tabel 9. Monitoring dan evaluasi strategi 3 43

Kotak

Kotak 1. Tipologi sub-lanskap Patimpeng Kahu 8



Foto oleh Landscape Alliance

01.
Latar Belakang

1.1. Apa itu Rencana Pengelolaan Sub-Lanskap?

Lanskap menghubungkan manusia dan alam yang tak terpisahkan. Lanskap bukan sekadar pemandangan, melainkan tempat di mana sejarah alam dan budaya berpadu. Setiap elemen, dari gunung hingga desa, saling memengaruhi dan menciptakan identitas unik bagi setiap wilayah. Keterkaitan yang erat ini menuntut pemahaman mendalam dan pengelolaan yang bijaksana, untuk memastikan kelestarian tetap terjaga.

Dalam lanskap yang terus berubah, di mana keberlanjutan menjadi kunci bagi masa depan kita, peran perencanaan lanskap menjadi semakin penting. Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) sub-lanskap hadir sebagai panduan strategis, sebuah cetak biru yang mengarahkan alokasi ruang di tingkat meso, di dalam sub-bentang lahan yang kita kelola. Lebih dari sekadar dokumen teknis, *Management Plan* adalah manifestasi dari visi bersama, dan menjadi sebuah upaya kolektif untuk menciptakan harmoni antara manusia dan alam.

Inti dari *Management Plan* adalah keadilan dan partisipasi. Melalui proses pemetaan unit perencanaan yang inklusif, setiap suara didengar, setiap kebutuhan dipertimbangkan. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan, kita membangun peta jalan yang bukan hanya realistis, tetapi juga aspiratif. Di setiap alokasi ruang, terkandung strategi pengelolaan yang disepakati, komitmen untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Tujuan utamanya adalah kelestarian. *Management Plan* menjadi instrumen untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Sumber daya alam dan lingkungan bukan hanya warisan yang kita terima, tetapi juga amanah yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Melalui alokasi ruang yang tepat dan pembagian peran yang jelas, kita membangun fondasi untuk pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan. Dengan mengelola setiap bagian secara bertanggung jawab, kita berkontribusi pada kesehatan dan vitalitas seluruh bentang lahan.

1.2. Di Mana Lokasi Sub-Lanskap Patimpeng?

Salah satu penanda pentingnya adalah Daerah Aliran Sungai (DAS), aliran air yang menyatukan lingkungan dari satu punggung bukit. Namun, batasan lanskap juga bisa berupa bentang alam khas, seperti rangkaian perbukitan, lembah yang subur, atau pesisir yang dinamis. Dalam konteks ini, keragaman lanskap di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggunakan Sub DAS sebagai penanda batas lanskap.

Upaya ini difokuskan pada enam lanskap atau enam Sub DAS percontohan yang menjadi bagian dari DAS Bila Walanae (Gambar 1 dan Tabel 1). Enam permata yang masing-masing menyimpan potensi dan tantangan tersendiri. Setiap lanskap memiliki Rencana Pengelolaan yang dirancang khusus, sebuah panduan yang mencerminkan visi, strategi, dan peta unit perencanaan yang unik. Dokumen ini menjabarkan detail dari Rencana Pengelolaan Lanskap Patimpeng Kahu.

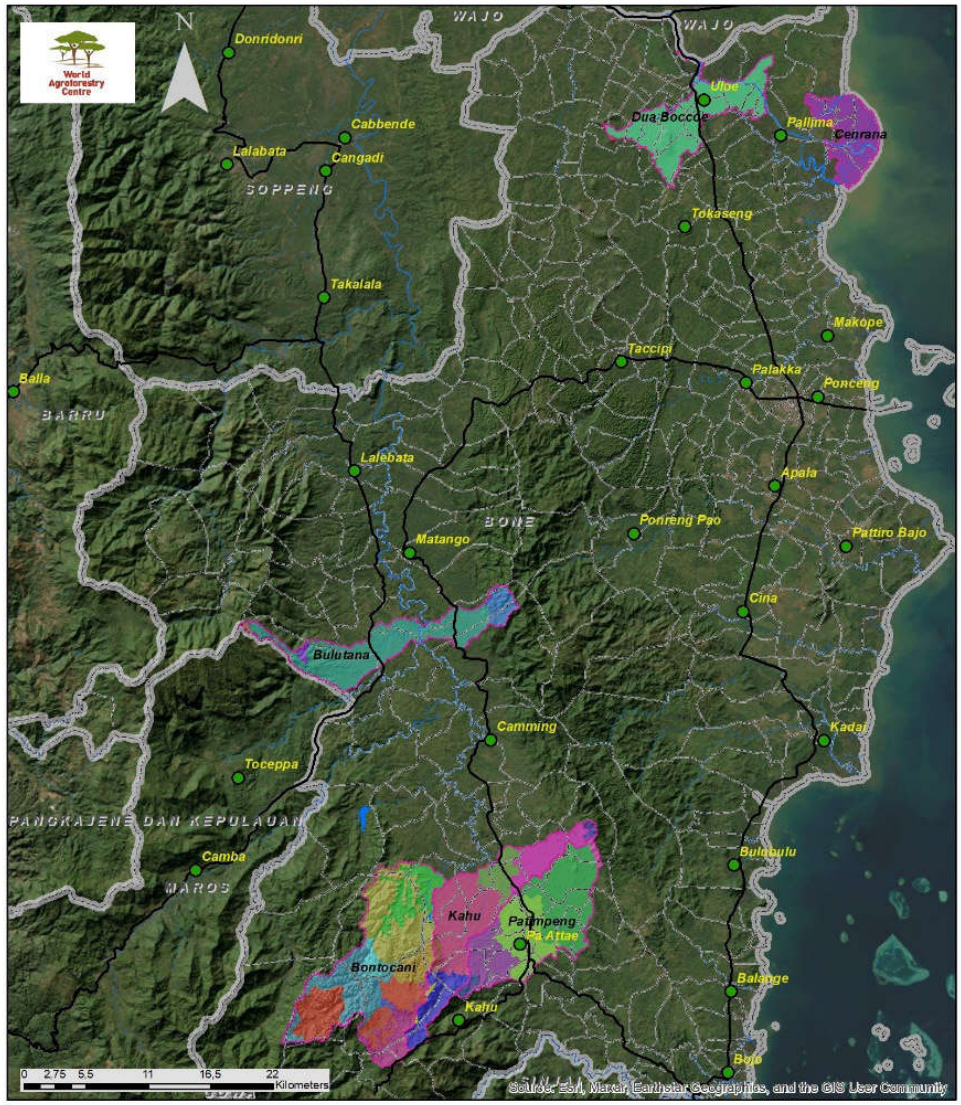
Keunikan pada masing-masing lanskap bukan tanpa alasan. Ia lahir dari suara kolektif para pemangku kepentingan, dari pengetahuan lokal yang mendalam, dan dari pemahaman yang kaya tentang kondisi spesifik setiap lanskap. Dengan pendekatan partisipatif ini, setiap *Management Plan* bukan hanya dokumen di atas kertas, tetapi juga cerminan dari komitmen bersama untuk menjaga dan mengembangkan lanskap.

Tabel 1. *Luas Area Lanskap Patimpeng Kahu*

Lanskap	Kawasan Hutan		Non-Kawasan Hutan		Luas
	Ha	%	Ha	%	Ha
Kahu	1.748	22,5	6.038	77,5	7.787
Bontocani	8.275	64,3	4.548	35,7	12.723
Patimpeng	341	4,0	8.003	95,9	8.003
Bulutana	879	14,8	5.048	85,1	5.048
Dua Boccoe	29,9	0,57	5.163	99,4	5.193
Cenrana	20,4	0,70	2.879	99,3	2.900
Jumlah	11.243	26,19	31.683	73,80	42.926

1.3. Metode Perencanaan Sub-Lanskap

Sub-lanskap merupakan kesatuan ekosistem yang kompleks. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik memainkan peran penting dalam mengatur iklim mikro dan makro. Dalam menghadapi perubahan iklim, solusi berbasis alam (*Nature-based Solution*/NbS) menawarkan pendekatan yang efektif untuk



Legenda

Kecamatan	**Kode Tipologi**	Bontocani, 5	Bulutana, 3	Kahu, 2	Kahu, 8
Jalan Poros	**Subsub DAS, Cluster**	Bontocani, 6	Bulutana, 4	Kahu, 3	Patimpeng, 1
Sungai	Bontocani, 1	Bontocani, 7	Cenrana, 1	Kahu, 4	Patimpeng, 2
Batas Subsub DAS	Bontocani, 2	Bontocani, 8	Dua Boccoe, 1	Kahu, 5	Patimpeng, 3
Batas Desa	Bontocani, 3	Bulutana, 1	Dua Boccoe, 2	Kahu, 6	Patimpeng, 4
Batas Kabupaten	Bontocani, 4	Bulutana, 2	Kahu, 1	Kahu, 7	Patimpeng, 5

Gambar 1. *Lokasi enam sub lanskap di Bone*

meningkatkan ketahanan lanskap. NbS, seperti restorasi hutan, pengelolaan lahan basah, praktik pertanian cerdas iklim, dan konservasi tanah dan air, memanfaatkan fungsi alami ekosistem untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Praktik-praktik ini tidak hanya membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer, tetapi juga meningkatkan kapasitas lanskap untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Dengan demikian, pengelolaan lanskap yang terintegrasi dengan NbS menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan iklim yang berkelanjutan.

Rencana Pengelolaan Sub-Lanskap berperan krusial dalam mengintegrasikan dan menerapkan NbS secara efektif. Melalui pemetaan unit perencanaan yang komprehensif, rencana ini mengidentifikasi area-area strategis untuk intervensi NbS, seperti zona restorasi hutan, kawasan perlindungan lahan, atau area pengembangan agroforestri. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan indikator kinerja yang terukur, Rencana Pengelolaan Sub-Lanskap memastikan bahwa implementasi NbS berkontribusi optimal terhadap ketahanan iklim. Selain itu, rencana ini juga memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan, mendorong kolaborasi dalam pelaksanaan NbS, dan memastikan keberlanjutan inisiatif-inisiatif tersebut dalam jangka panjang. Dengan demikian, Rencana Pengelolaan Sub-Lanskap menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan lanskap yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Sub-Lanskap dimulai dengan (1) peningkatan kesadaran (*awareness raising*) dan pemetaan permasalahan lanskap. Seluruh pemangku kepentingan diajak untuk menyelami realitas lanskap, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Ini adalah tahap fondasi, di mana setiap suara didengar, dan setiap permasalahan dipetakan dengan cermat.



Gambar 2. *Metode yang digunakan dalam perencanaan lanskap*

Langkah berikutnya adalah (2) penetapan visi sub-lanskap. Sebuah arah yang disepakati bersama, sebuah mimpi yang ingin diwujudkan. Visi ini menjadi kompas yang memandu setiap langkah perencanaan.

Kemudian, (3) strategi, intervensi, dan target pengelolaan sub-lanskap dirumuskan, didukung oleh peta tipologi karakteristik lanskap yang mendalam. Setiap strategi dipilih dengan pertimbangan matang, disesuaikan dengan karakteristik unik lanskap, dan ditargetkan untuk mencapai hasil yang optimal.

(4) Rantai hasil (*result chain*) dan lokasi intervensi ditentukan dengan cermat, menggunakan peta unit perencanaan sebagai panduan. Setiap unit perencanaan menjadi fokus tindakan, di mana intervensi-intervensi spesifik dirancang untuk mencapai tujuan pengelolaan.

Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, (5) rencana bisnis dikembangkan, merinci peluang dan strategi untuk memanfaatkan potensi lanskap secara berkelanjutan.

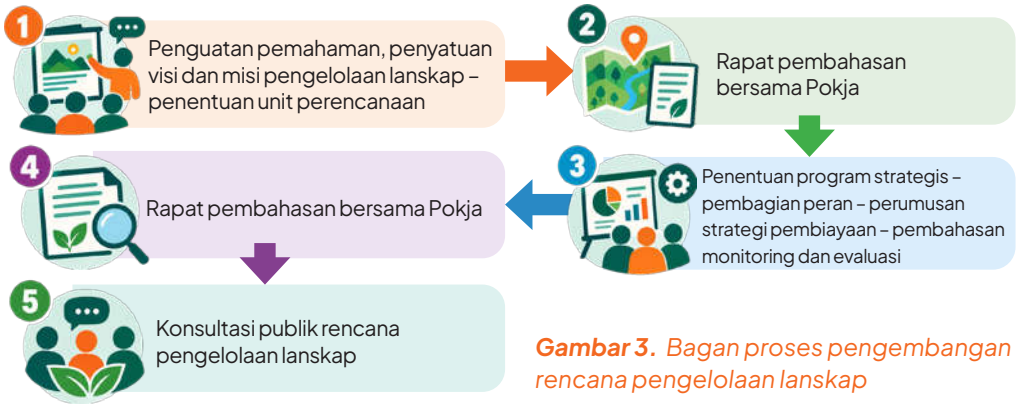
(6) Sistem pemantauan dan evaluasi (*Monitoring* & Evaluasi/M&E) dirancang untuk mengukur kemajuan dan efektivitas implementasi rencana. Sistem ini menjadi alat yang berharga untuk belajar dan beradaptasi, memastikan bahwa rencana pengelolaan tetap relevan dan efektif.

Akhirnya, seluruh proses ini didokumentasikan melalui (7) penulisan rencana pengelolaan, sebuah dokumen komprehensif yang merangkum visi, strategi, langkah-langkah konkret untuk mewujudkan lanskap yang berkelanjutan, serta bagaimana memantau dan mengevaluasi keberhasilan implementasi strategi yang dijalankan.

1.4. Proses Pengembangan Rencana

Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Sub-Lanskap merupakan sebuah upaya kolaboratif yang dipimpin oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Bentang Lahan. Pokja, sebagai wadah multipihak, mempertemukan beragam pemangku kepentingan, antara lain perwakilan dinas terkait, komunitas lokal, pemimpin desa dan kecamatan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan perencanaan yang harmonis.

Tahap awal dimulai dengan membangun pemahaman bersama mengenai pengelolaan lanskap berkelanjutan. Pemangku kepentingan kemudian merumuskan visi dan misi pengelolaan sub-lanskap, mencerminkan harapan dan cita-cita bersama. Selanjutnya, unit-unit perencanaan ditetapkan sebagai



Gambar 3. *Bagan proses pengembangan rencana pengelolaan lanskap*

dasar alokasi ruang untuk mencapai misi tersebut. Seluruh proses ini terangkum dalam Diskusi Terpumpun, yang hasilnya kemudian dibahas secara mendalam dalam rapat Pokja.

Perumusan Rencana Pengelolaan Lanskap dilanjutkan dengan mengidentifikasi program-program strategis berbasis alam/NbS yang dibutuhkan untuk mencapai visi. Setiap program dijabarkan dalam pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan. Kebutuhan pendanaan juga dibahas untuk merumuskan strategi pembiayaan yang berkelanjutan. Sebagai pelengkap, disusun pula Sistem Pemantauan dan Evaluasi yang partisipatif.

Proses ini diakhiri dengan Konsultasi Publik, sebuah forum untuk menyampaikan Rencana Pengelolaan Lanskap kepada khalayak luas. Masukan yang diterima selama konsultasi publik digunakan untuk menyempurnakan rencana tersebut. Rencana Pengelolaan Lanskap ini kemudian menjadi panduan kolektif untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

02.
Profil Lanskap Patimpeng


Foto oleh Landscape Alliance

2.1. Gambaran Umum

Di bagian tengah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terhampar Lanskap Patimpeng, sebuah wilayah yang kaya akan keindahan alam dan kehidupan. Lanskap ini meliputi sebagian Kecamatan Patimpeng (sekitar 52%) dan sebagian Kecamatan Kahu (sekitar 48%), menempatkannya sebagai daerah hulu yang vital bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila-Walanae. Sebagai sumber kehidupan bagi wilayah hilir, keberadaan dan kelestarian Lanskap Patimpeng memiliki peran yang sangat penting.

Dengan luas wilayah mencapai 8.344 hektare, Lanskap Patimpeng dikenal memiliki proporsi di luar kawasan hutan yang lebih dominan. Kondisi ini mencerminkan potensi besar Lanskap Patimpeng untuk menjaga keseimbangan ekologis dan menyediakan berbagai jasa lingkungan.

Lanskap ini menjadi rumah bagi 10 desa di Kecamatan Patimpeng dan Kahu. Lebih dari 23.000 jiwa mendiami lanskap ini, dengan sebaran penduduk yang beragam. Kepadatan penduduk bervariasi secara signifikan, dari 15 hingga 364 orang per kilometer persegi, mencerminkan perbedaan karakteristik wilayah dan pola permukiman di setiap desa (BPS, 2024).

Lanskap Patimpeng bukan hanya sekadar hamparan geografis, tetapi juga rumah bagi warisan budaya dan keanekaragaman hayati yang kaya. Keberadaan lanskap ini, sebagai daerah hulu, sangat berpengaruh pada daerah di bawahnya.

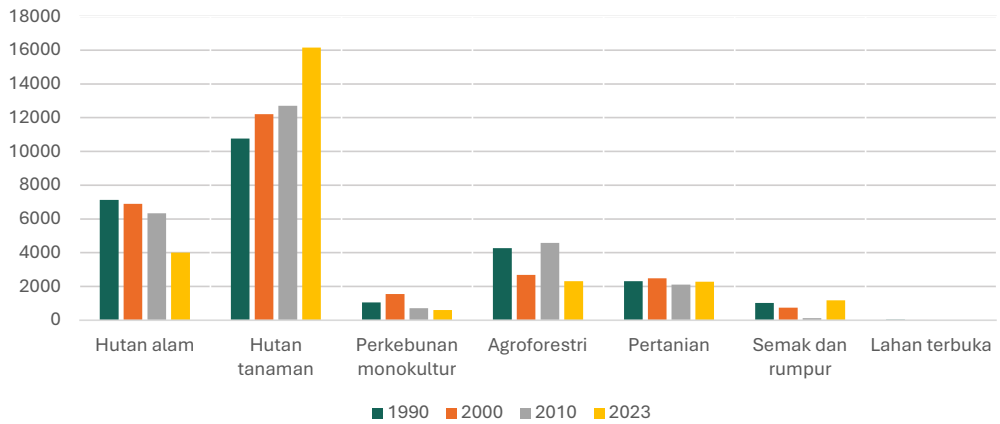
Kotak 1. *Tipologi sub-lanskap Patimpeng Kahu*

8.002 ha berlokasi di Areal Penggunaan Lain (APL) dengan risiko banjir tinggi dan longsor sedang. Luas lahan garapan tinggi, luas area yang sesuai untuk padi tadah hujan dan jagung tinggi. Luas area yang sesuai untuk tanaman tahunan (durian, cengkeh, alpukat dan kelapa) tinggi. Akses jalan utama sedang, infrastruktur baik, kemiskinan tinggi. Sedangkan 341 ha berada pada areal hutan produksi.

2.2. Penggunaan Lahan

Sub-Lanskap Patimpeng, memiliki kondisi sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh letak geografis dan sumber daya alam yang tersedia. Sebagian besar masyarakat di kedua kecamatan ini mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Potensi pertanian yang ada meliputi berbagai komoditas, termasuk perkebunan seperti kelapa, kakao dan kopi serta buah-buahan. Namun, produktivitas pertanian sering kali dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan akses pasar dan infrastruktur yang belum memadai.

Sementara itu, luas hutan alam cenderung terus menurun dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 terdapat 3.998 ha. Sebaliknya, luas hutan tanaman meningkat dengan signifikan dalam satu dasawarsa terakhir. Luas areal agroforestri dan pertanian cenderung fluktuatif. Komposisi penggunaan lahan didominasi dengan tanaman perkebunan kelapa, coklat, kopi dan kakao, baik yang ditanam secara monokultur maupun dengan sistem agroforestri.



Gambar 4. *Dinamika perubahan penggunaan lanskap Patimpeng Kahu (1990–2023)*

Jumlah lahan yang belum termanfaatkan, seperti semak belukar, rumput dan lahan terbuka cukup signifikan (320 ha). Hal ini memungkinkan lanskap ini untuk terus berkembang dengan memanfaatkan penggunaan lahan yang ada.

2.3. Sosial Ekonomi

Kondisi infrastruktur, seperti akses jalan dan jaringan internet, menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi di Lanskap Patimpeng. Keterbatasan infrastruktur menghambat distribusi hasil pertanian dan akses informasi, yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, guna mendukung perekonomian lokal.

Dalam hal sosial, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan menjadi faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya peningkatan pendidikan dan penyuluhan tentang praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Secara umum, kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Patimpeng menunjukkan adanya potensi besar yang perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur, akses pasar, dan pengembangan sumber daya manusia.

2.4. Permasalahan Sub-Lanskap Patimpeng

Sub-Lanskap Patimpeng, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya terungkap. Hutan-hutannya menghasilkan madu hutan berkualitas tinggi, namun potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ini masih terpendam, belum diolah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Di wilayah yang memiliki potensi pertanian, lahan dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, Sub-lanskap Patimpeng juga menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks. Alih fungsi lahan dari tanaman hutan menjadi lahan pertanian, terutama untuk jagung, semakin marak terjadi, mengancam keseimbangan ekosistem. Serangkaian bencana alam, seperti kebakaran hutan yang sering terjadi, serta sedimentasi pada sungai akibat erosi, semakin memperburuk kondisi lingkungan. Selain itu, praktik *illegal logging* dan pertambangan ilegal semakin mengancam kelestarian sumber daya alam.



Foto oleh Landscape Alliance

Ketersediaan air untuk lahan pertanian masih menjadi kendala utama, menghambat produktivitas pertanian masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga dan peran perempuan dalam pemenuhan gizi yang masih kurang turut berkontribusi pada rendahnya ketahanan pangan di wilayah ini.

Infrastruktur dasar, seperti akses jalan yang belum memadai, semakin menghambat mobilitas dan akses pasar bagi para petani. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga menjadi tantangan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik tenurial dan ketidakpastian status lahan menciptakan ketidakstabilan, menghambat investasi dan pengelolaan lahan secara bijaksana.

Di tengah tantangan ini, tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah memperburuk situasi. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan agar kekayaan alam Sub-Lanskap Patimpeng dapat terjaga untuk generasi mendatang. Pengelolaan lanskap yang bijaksana, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk membuka potensi dan mengatasi tantangan ini, menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

03.
Visi Harapan Pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng

3.1. Visi Pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng

Visi ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cerminan dari aspirasi kolektif untuk menciptakan harmoni antara kelestarian alam dan kesejahteraan manusia. Fondasi dari visi ini adalah Alam terjaga. Masyarakat Patimpeng menyadari bahwa keberlanjutan sumber daya alam adalah kunci untuk masa depan yang sejahtera. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk menjaga sumber daya alam dengan proses intensifikasi agroforestri guna mempertahankan tutupan hutan, merehabilitasi lahan kritis untuk mengurangi erosi dan banjir, serta mengurangi degradasi lingkungan melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, konservasi tanah dan air, serta mitigasi perubahan iklim.

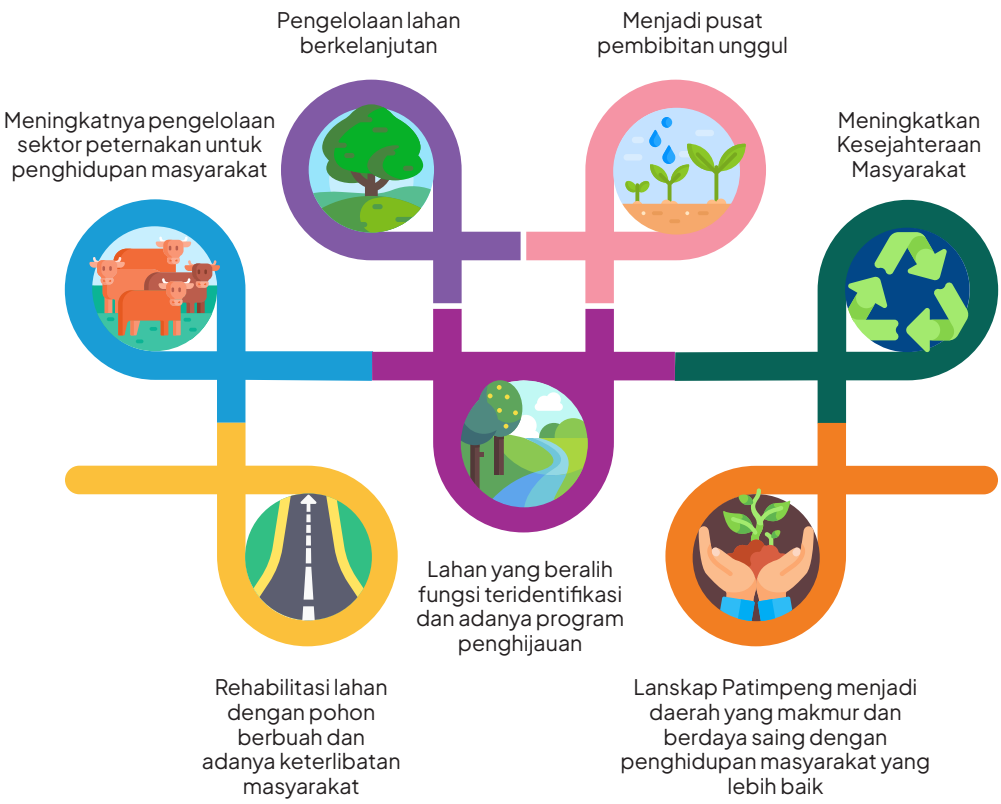
Selanjutnya, visi ini menekankan Masyarakat Sejahtera. Hal ini dicapai melalui berbagai upaya, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi usaha, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul juga menjadi fokus, dengan investasi dalam pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Pengelolaan pertanian yang produktif pun diupayakan melalui peremajaan tanaman kakao untuk meningkatkan produktivitas, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam praktik pertanian dan kehutanan, serta peningkatan tingkat ekspor kakao dan kopi guna memperluas pasar sehingga meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani.

Untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, masyarakat patimpeng perlu memiliki daya saing yang kuat. Hal ini diwujudkan melalui tata kelola kelembagaan yang baik, dengan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengurangan konflik tenurial dan ketidakpastian status lahan. Pengembangan potensi ekonomi lokal juga menjadi prioritas, pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan industri kreatif, serta peningkatan akses pasar untuk produk-produk lokal. Visi ini menjadi landasan bagi penyusunan strategi dan program-program pengelolaan lanskap yang terintegrasi dan partisipatif. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, masyarakat Patimpeng bertekad untuk mewujudkan visi mereka, menciptakan lanskap yang lestari dan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

Visi: Alam Terjaga, Bencana Berkurang dan Masyarakat Sejahtera

7 Harapan Masyarakat Patimpeng di masa mendatang:



Gambar 5. *Visi dan Harapan Masyarakat di Sub-Lanskap Patimpeng*

04.
Harapan Pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng

4.1. Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Tantangan Dalam Pengelolaan Lanskap Patimpeng

Sub-Lanskap Patimpeng memiliki potensi pertanian yang menjanjikan dengan ketersediaan lahan pertanian yang subur. Keberadaan kelompok tani menjadi modal sosial yang berharga dalam pengembangan pertanian di wilayah ini. Potensi untuk mengembangkan berbagai komoditas didukung oleh sumber daya alam yang memadai, termasuk adanya sungai sebagai sumber air. Populasi SDM muda yang banyak menjadi potensi tenaga kerja produktif di sektor pertanian. Beberapa keunggulan lain yang menunjang sektor pertanian adalah adanya pendampingan tentang pembuatan pupuk organik dan pembibitan, serta keberadaan peternakan dan pabrik gula yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.


Foto oleh Landscape Alliance

Namun demikian, terdapat sejumlah kelemahan yang membatasi kemajuan wilayah ini. Sektor pertanian di lanskap Patimpeng masih menghadapi beberapa kendala. Manajemen waktu bertani yang masih kurang optimal dan kualitas SDM pertanian yang belum memadai menjadi hambatan dalam peningkatan produktivitas. Pengetahuan petani tentang komoditas selain padi dan jagung juga masih minim, sementara ketersediaan air untuk pertanian sering menjadi masalah. Keterbatasan akses terhadap bibit unggul dan harga jual yang kurang baik menambah daftar kelemahan. Ketergantungan pada tengkulak dalam memasarkan hasil pertanian dan terbatasnya akses permodalan untuk bertani juga menghambat perkembangan sektor ini. Masih banyak lahan kosong yang belum dikembangkan dan petani belum sepenuhnya memahami kondisi lahan mereka.

Di sisi lain, Sub-lanskap Patimpeng memiliki peluang besar untuk dikembangkan antara lain adanya pendampingan untuk membantu perencanaan kelompok tani dan percontohan pengelolaan lahan yang belum produktif seperti kebun campur. Pembuatan pupuk organik dalam skala besar dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Penanganan hama secara terpadu dan pemanfaatan harga yang stabil untuk komoditas utama juga menjadi peluang yang menjanjikan. Akses pengelolaan hutan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat. Selain itu, penanaman dengan agroforestri buah-buahan serta konservasi tanah dan air dapat mengatasi permasalahan ketersediaan air dalam jangka panjang. Penanaman komoditas unggul yang berbeda dengan petani lain juga menjadi strategi diferensiasi yang potensial.

Namun, tantangan utama yang harus diwaspadai adalah alih fungsi hutan menjadi lahan jagung yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Hama berupa binatang besar seperti babi dan monyet dari hutan mulai mengganggu lahan pertanian. Kemarau panjang atau cuaca tidak menentu akibat perubahan iklim juga menimbulkan ketidakpastian dalam produksi pertanian. Serangan hama wereng pada padi dan penyakit fusarium pada pisang dan tanaman perkebunan mengurangi produktivitas hasil pertanian. Terjadinya penurunan harga komoditas karena produksi yang melimpah dan permainan harga pasar oleh tengkulak juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai oleh petani di kawasan ini.

05.

Strategi Intervensi dan Rencana Ruang Pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng


Foto oleh Landscape Alliance

5.1. Strategi Intervensi Pengelolaan Sub-Lanskap

Sub-lanskap Patimpeng dikaruniai kekayaan alam yang beragam, mulai dari potensi lahan pertanian yang subur, ketersediaan sumber daya air, hingga potensi pengembangan berbagai komoditas. Keberagaman ini menjadi modal penting dalam upaya mewujudkan visi Sub-lanskap Patimpeng: "Alam terjaga, bencana berkurang dan masyarakat sejahtera. Berdasarkan visi tersebut dan analisis SWOT yang komprehensif, beberapa strategi pengelolaan lanskap telah dirumuskan untuk membawa masyarakat Patimpeng menuju masa depan yang dicita-citakan.

Strategi-strategi ini meliputi upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian, diversifikasi komoditas, penguatan kelembagaan petani, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan strategi ini tidak hanya mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki Patimpeng, seperti kesuburan lahan dan potensi SDM muda, tetapi juga memperhatikan kelemahan dan ancaman yang ada, seperti keterbatasan pengetahuan petani, ketergantungan pada tengkulak, dan ancaman perubahan iklim. Tiga strategi kunci yang akan diimplementasikan antara lain:

1. *Praktik budidaya unggul*

Pengembangan komoditas buah-buahan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan petani dan diversifikasi usaha tani. Perbaikan akses pemodalan untuk pengelolaan lahan dan pengembangan usaha akan memperkuat daya saing petani, sementara pendampingan kelompok tani yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, kelompok tani, pihak swasta, dan lembaga non-pemerintah akan membantu peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani. Selain itu, perbaikan akses pasar bagi petani akan membuka peluang distribusi yang lebih luas dan meningkatkan nilai jual hasil pertanian, sehingga mampu mendukung kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat tani secara berkelanjutan.

2. *Peningkatan akses pengelolaan hutan*

Peningkatan akses pengelolaan hutan melalui kelompok tani hutan memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Melalui kelompok tani hutan, masyarakat lokal mendapatkan kesempatan untuk mengelola kawasan hutan secara bertanggung jawab, yang memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan. Dukungan dan pembinaan dari pemerintah dan pihak terkait membantu memperkuat kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola hasil hutan bukan kayu, seperti madu, rotan, dan komoditas lainnya. Dengan adanya akses ini, kelompok tani hutan dapat memanfaatkan hutan secara produktif sambil tetap menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal dan mendorong peran aktif mereka dalam pelestarian hutan.

3. *Peningkatan akses terhadap sumber air*

Peningkatan akses terhadap sumber air pertanian merupakan langkah krusial untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Akses air yang memadai memungkinkan petani mengelola lahan mereka dengan lebih baik, mengurangi ketergantungan pada curah hujan, dan mengoptimalkan musim tanam. Diperlukan berbagai cara untuk pengembangan pengelolaan air

Keberhasilan implementasi strategi-strategi ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta. Kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan Lanskap Patimpeng yang lebih baik, di mana peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam setempat.

Strategi-strategi kunci ini sejalan dengan salah satu arah kebijakan dalam Misi 2 RPJPD Kabupaten Bone, yaitu penguatan tata kelola sektor pertanian yang berbasis kemandirian pangan dan ketahanan air melalui penerapan praktik pertanian yang baik, dan upaya konservasi tanah dan air (RPJPD Bone 2025–2045).

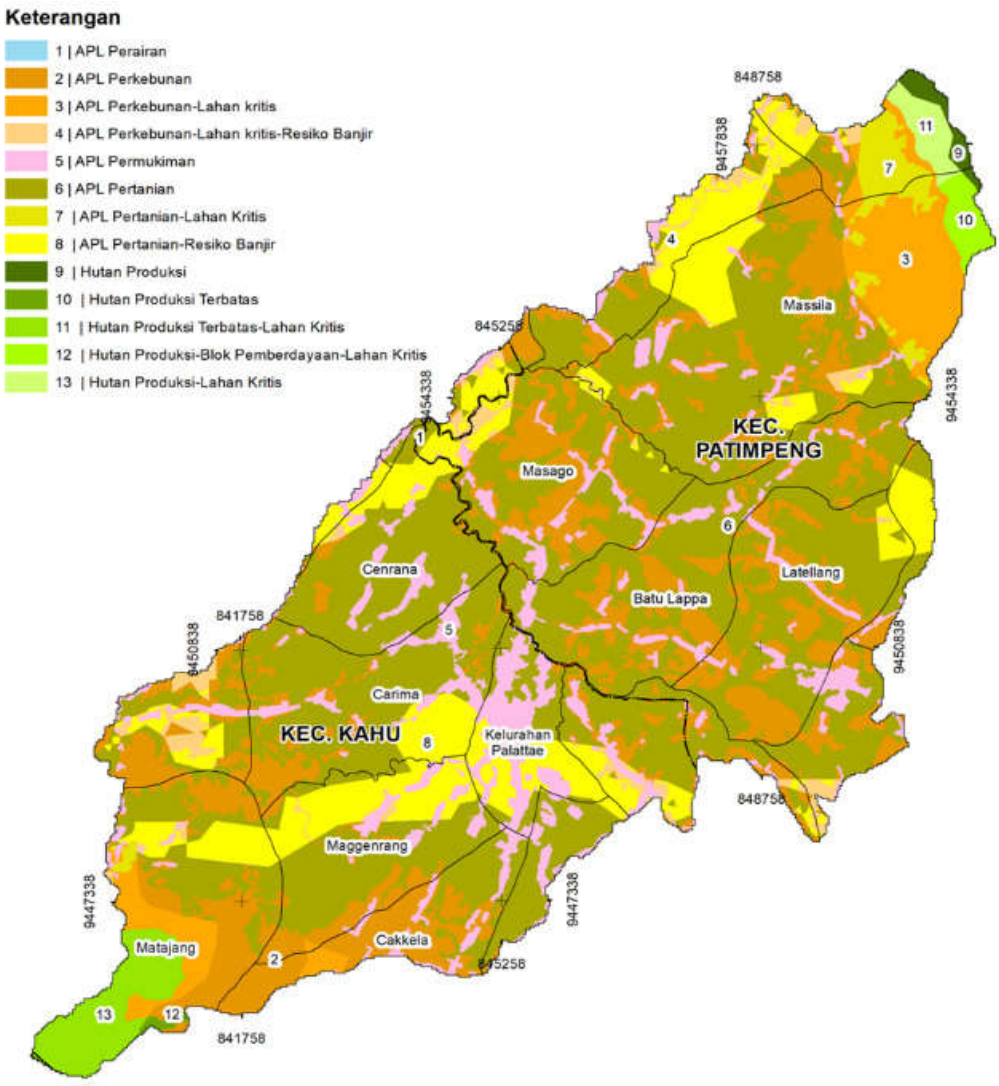


Gambar 6. *Strategi Pengelolaan Lanskap Patimpeng*

5.2. Rencana Alokasi Ruang

Salah satu luaran dalam Rencana Pengelolaan Lanskap adalah rencana alokasi ruang yang disusun berdasarkan berbagai fungsi dan karakteristik. Rencana pengelolaan di sini dituangkan dalam unit analisis yang dikenal sebagai unit Perencanaan, yang digunakan untuk mengelompokkan wilayah-wilayah dalam lanskap Patimpeng yang memiliki kesamaan karakteristik. Peta ini menjadi dasar identifikasi lokasi area intervensi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik tiap wilayah. Kawasan Patimpeng terbagi dalam Kawasan Hutan Produksi (4%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) (95,9%).

Dalam APL, unit perencanaan terbesar adalah APL Pertanian, yang mencakup 47,94% dari total APL (3.834,80 ha), terdiri dari APL Pertanian reguler (47,9%), APL Pertanian-Lahan Kritis (1,5%), dan APL Pertanian-Risiko Banjir (12,2%). Komponen penting lainnya adalah APL Perkebunan, yang meliputi 21,72% dari total APL (1.737,11 ha), terbagi menjadi APL Perkebunan reguler (21,7%), APL Perkebunan-Lahan Kritis (5,1%), dan APL Perkebunan-Lahan Kritis-Risiko Banjir (2,4%). Selain itu, terdapat APL Permukiman (9,23% dari APL atau 738,52 ha) dan APL Perairan (0,02% dari APL atau 1,47 ha).



Gambar 7. *Peta rencana alokasi ruang Patimpeng*

Sementara itu, Kawasan Hutan Produksi (HP) mencakup 4,09% dari total kawasan (341,56 ha). HP didominasi oleh Hutan Produksi Terbatas (2,98%), dengan sebagian besar lahannya berada dalam kondisi kritis (54,4% dari HP). Selain itu, Hutan Produksi mencakup 42,6% dari total HP, terdiri dari Hutan Produksi reguler (9,8%), Hutan Produksi-Blok Pemberdayaan-Lahan Kritis (15,8%), dan Hutan Produksi-Lahan Kritis (17,0%).

Secara keseluruhan, lahan kritis mendominasi kawasan Hutan Produksi hingga mencapai 87,2% dari total HP, menegaskan perlunya upaya rehabilitasi dan konservasi yang lebih intensif. Di area APL, sekitar 9% berada dalam status lahan kritis dan memiliki risiko banjir, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk mencegah degradasi lebih lanjut dan mengurangi risiko bencana. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan pengelolaan lanskap yang terpadu dan berkelanjutan di Sub-lanskap Patimpeng.

5.3. Rencana Pengelolaan

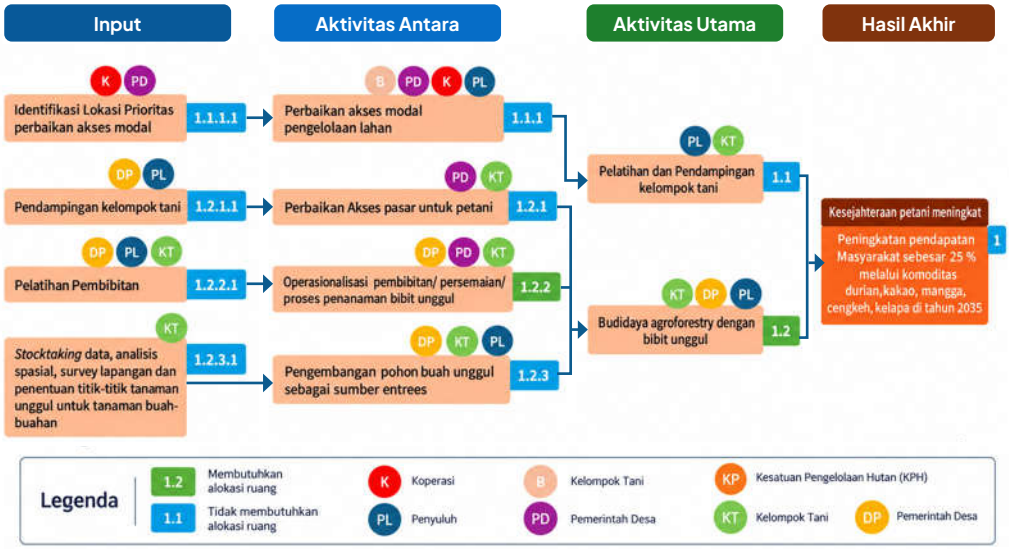
Salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan rencana pengelolaan adalah diskusi dengan pemangku kepentingan dengan metode rantai hasil (*result chain*). Pada tahap ini, diidentifikasi aktivitas utama, aktivitas antara dan input untuk mendapat target yang telah disepakati. Kemudian, pada masing-masing aktivitas diidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat. Lalu tahap berikutnya, dengan menggunakan hasil pemetaan rantai hasil, dilakukan penentuan lokasi kegiatan kunci dengan menggunakan peta unit perencanaan. Proses ini krusial untuk menyepakati lokus dari kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam strategi ini. Dengan melakukan tahapan ini, maka rencana kegiatan tersambung dan terintegrasi langsung dengan alokasi ruang. Dalam prosesnya, pemangku kepentingan yang terlibat menyepakati lokasi-lokasi kegiatan melalui proses diskusi dan mufakat.

Strategi 1 – Praktik Budidaya Unggul

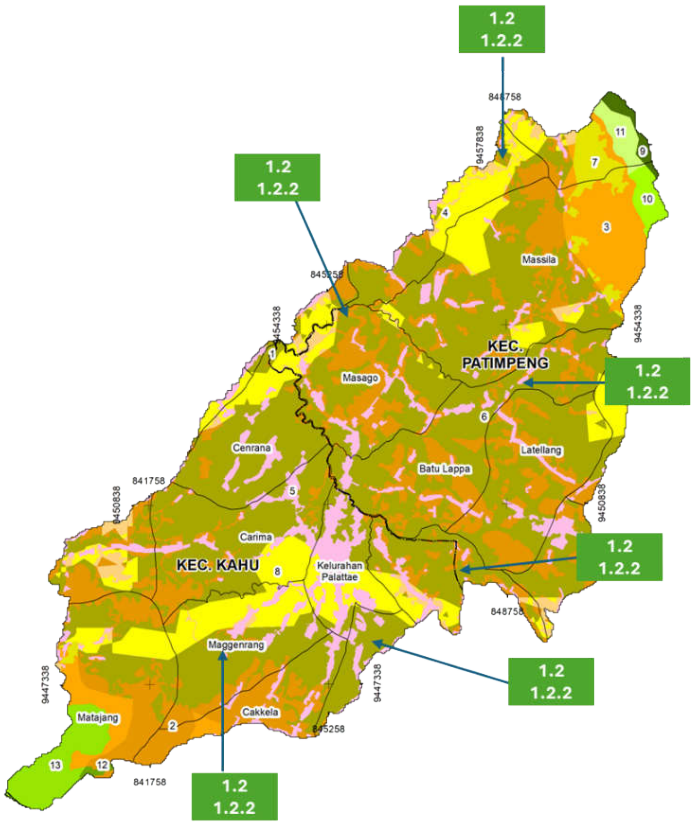
Strategi pertama pengelolaan sub-lanskap Patimpeng adalah praktik budidaya unggul yang menargetkan 25% peningkatan pendapatan di lanskap ini dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan menggunakan pendekatan *result-chain*, teridentifikasi dua aktivitas utama dari strategi ini, yaitu pelatihan dan pendampingan kelompok tani intensif, serta penanaman dengan bibit unggul.

Peningkatan kapasitas petani, terutama dalam mengakses permodalan merupakan salah satu faktor penting agar petani dapat mengakses teknologi untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan. Selain itu, ketersediaan bibit unggul juga menjadi hal yang perlu didorong agar petani dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perkebunannya.

Kegiatan yang dapat dipetakan pada tahapan ini adalah kegiatan 1.2 budidaya agroforestri dengan bibit unggul dan 1.2 operasionalisasi pembibitan dan penanaman.



Gambar 8. *Rantai Hasil Strategi 1*

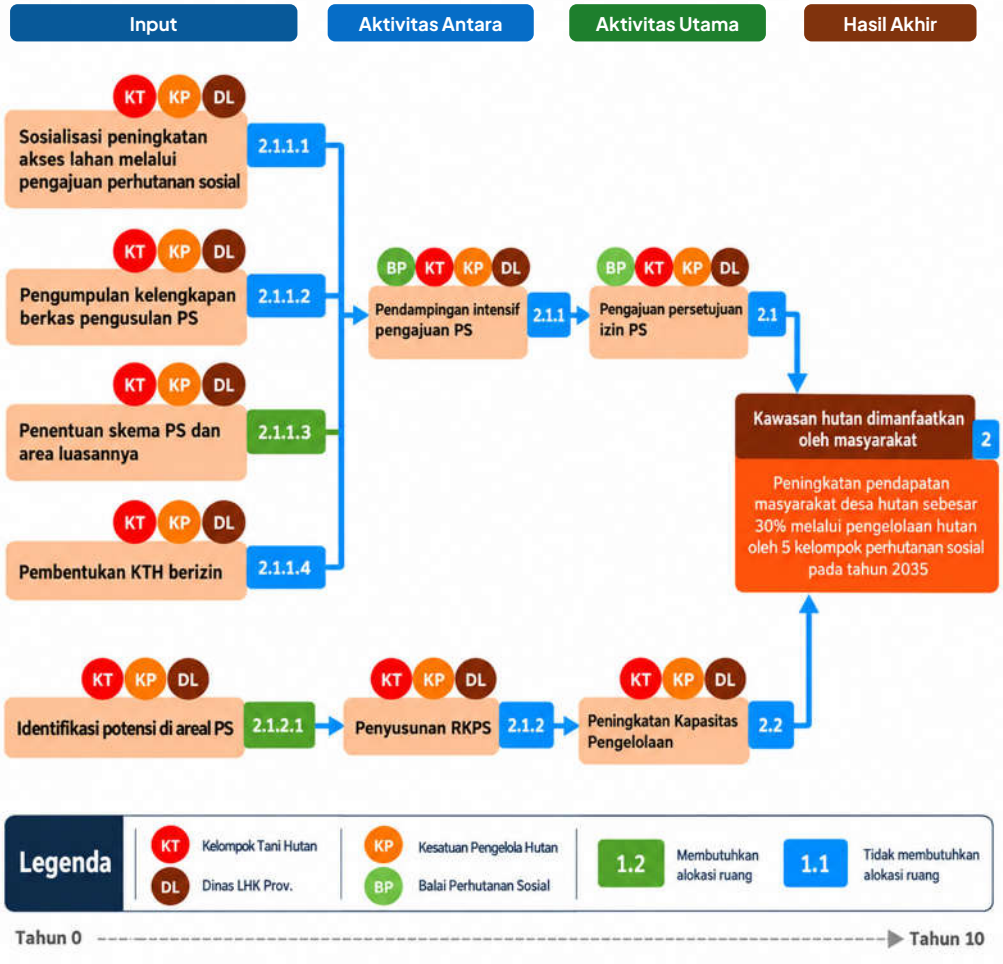


Gambar 9. *Lokasi Intervensi Strategi 1*

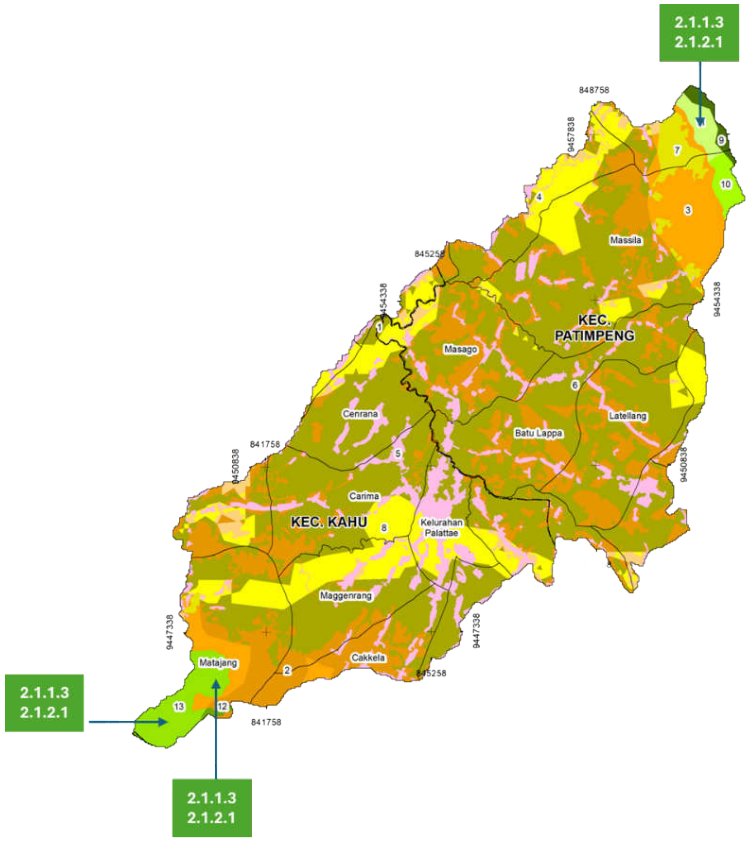
Strategi 2 – Akses lahan untuk penghidupan

Strategi kedua pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng adalah akses lahan untuk penghidupan yang menargetkan 30% peningkatan pendapatan di lanskap ini dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan menggunakan pendekatan *result-chain*, teridentifikasi dua aktivitas utama dari strategi ini, yaitu Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pendampingan intensif dan pengajuan izin pengelolaan kawasan hutan melalui perhutanan sosial.

Kegiatan utama yang dapat dipetakan pada tahapan ini adalah kegiatan 2.1.1.3 Penentuan skema PS dan areal luasannya dan 2.1.2.1 Identifikasi potensi di areal PS. Pada Gambar 13 Rantai hasil strategi 2, kegiatan yang memerlukan alokasi ruang diberi kode berwarna hijau.



Gambar 10. *Rantai Hasil Strategi 2*

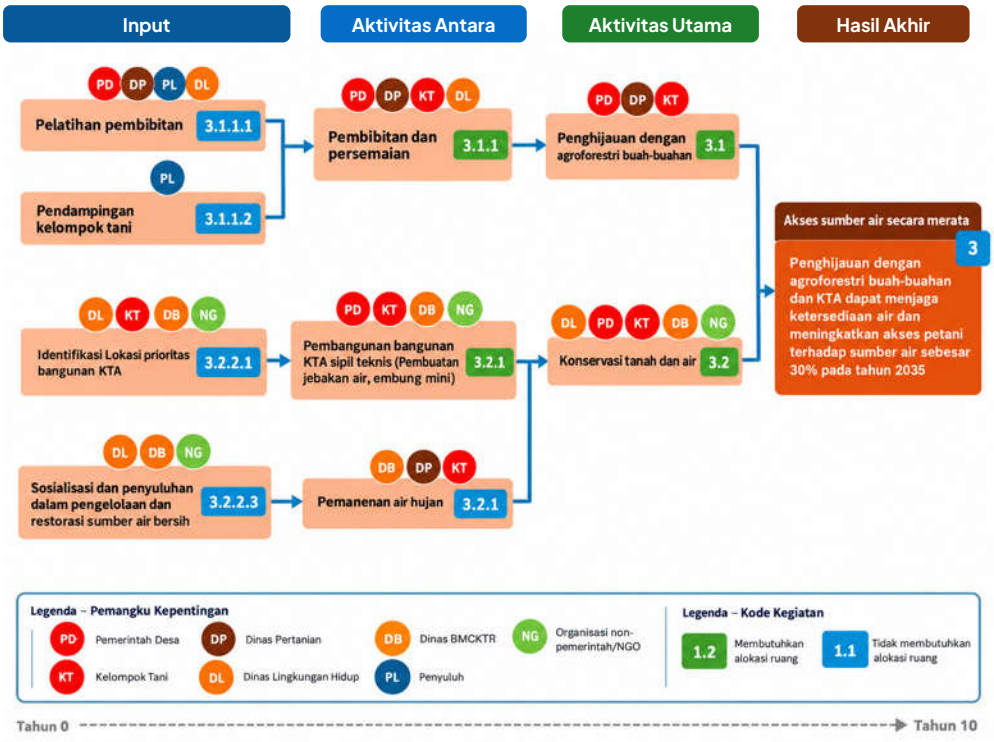


Gambar 11. *Lokasi intervensi strategi 2*

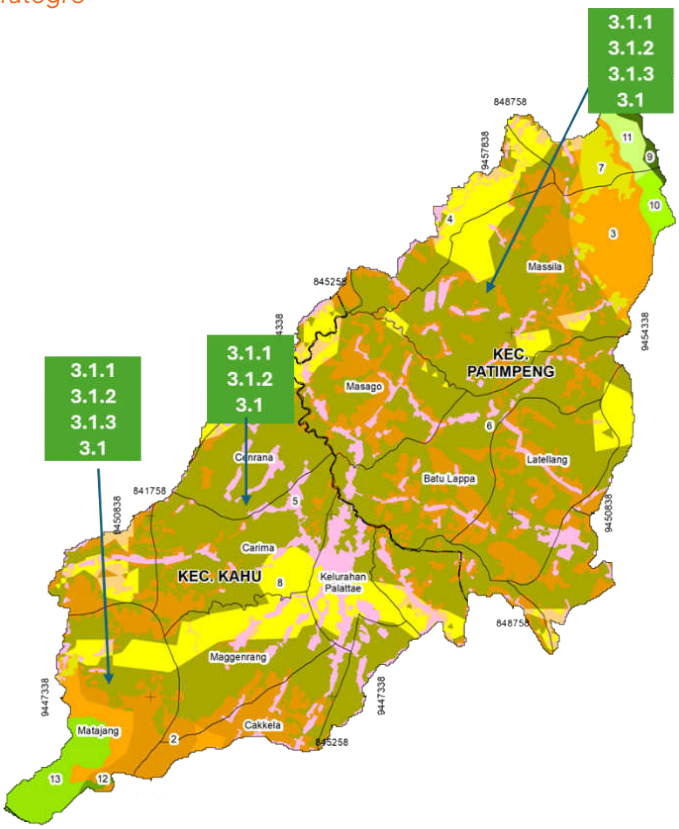
Strategi 3 – Peningkatan akses terhadap sumber air

Strategi ketiga pengelolaan Lanskap Patimpeng adalah peningkatan akses terhadap sumber air pertanian yang menargetkan 30% peningkatan jangkauan sumber air melalui perlindungan sumber di lanskap ini dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan menggunakan pendekatan *result-chain*, teridentifikasi dua aktivitas utama dari strategi ini, yaitu penghijauan dengan agroforestri buah-buahan dan konservasi tanah dan air (KTA).

Kegiatan yang dapat dipetakan adalah identifikasi lokasi wilayah yang memerlukan bangunan KTA sipil teknis dan areal untuk penghijauan dengan agroforestri dengan pohon buah-buahan seperti durian.



Gambar 12. *Rantai Hasil Strategi 3*

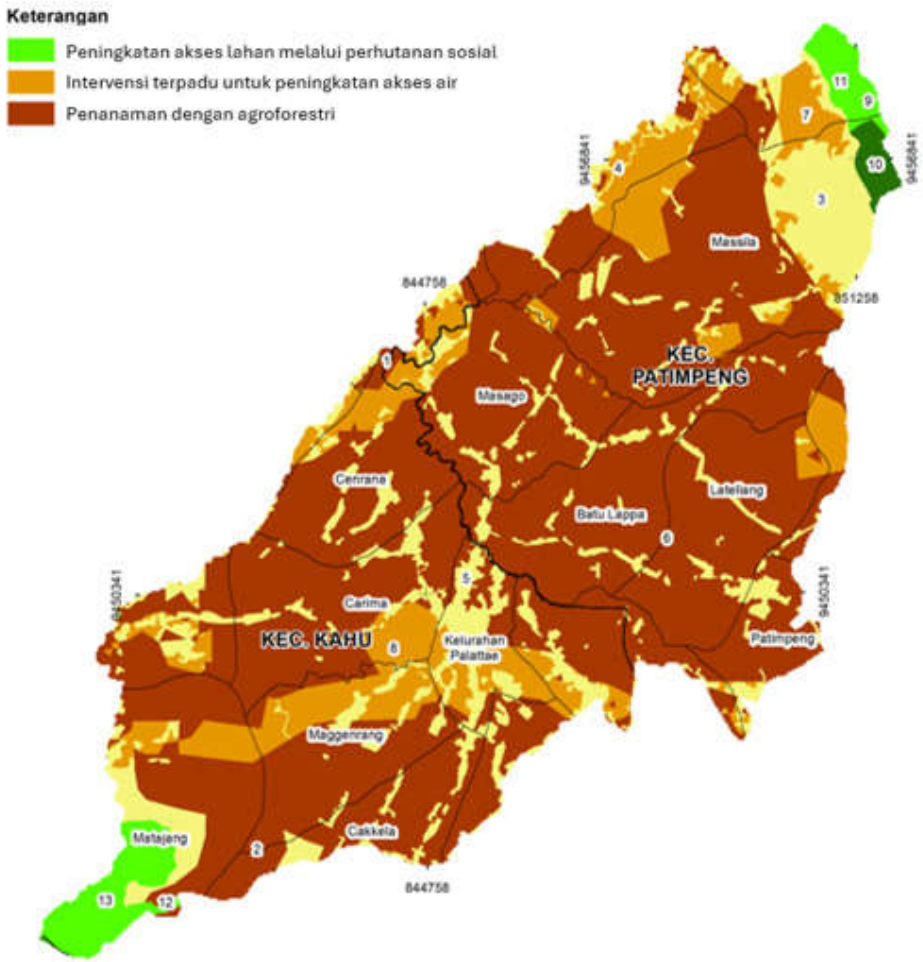


Gambar 13. *Lokasi intervensi strategi 3*

5.4. Peta Intervensi

Peta intervensi adalah representasi spasial dari strategi pengelolaan lanskap yang menunjukkan lokasi spesifik di mana intervensi tertentu akan diterapkan. Peta ini disusun berdasarkan unit dan penentuan lokasi kegiatan intervensi. Dengan menggunakan peta intervensi, keputusan-leputusan pengelolaan yang spesifik dapat dibuat secara lebih akurat, dengan memastikan bahwa setiap tindakan selaras dengan kondisi kebutuhan spesifik tiap wilayah.

Kedua strategi Lanskap Patimpeng telah dipetakan pada unit perencanaan yang ada. Penanaman dengan agroforestri buah-buahan memiliki cakupan area terbesar, mencakup 5.571,9 ha atau 64,1% dari total luas wilayah. Intervensi Terpadu untuk peningkatan akses air mencakup 2.426 ha atau 27,9%, sementara peningkatan akses lahan melalui perhutanan sosial 341,5 ha atau 3,9%.



Gambar 14. *Peta intervensi Patimpeng*

06.

Pengembangan Usaha Berbasis Sub-Lanskap Berkelanjutan dan Potensi Lokal melalui Pendekatan Model Bisnis Terintegrasi Agroforestri berbasis Jagung



Foto oleh Landscape Alliance

Model bisnis terintegrasi merupakan pendekatan strategis dalam perencanaan usaha masyarakat yang berbasis pada potensi spesifik tiap sub-lanskap. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi lokal, tetapi juga mendukung pengelolaan bentang lahan secara berkelanjutan. Dengan perencanaan usaha yang terarah dan berbasis data, model ini menjadi panduan praktis bagi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif dan ramah lingkungan.

Keanekaragaman sumber daya di Sub-lanskap Patimpeng membuka peluang untuk merancang model bisnis yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Dalam konteks ini, pengembangan usaha ditekankan pada penerapan praktik budidaya unggul, seperti penggunaan benih berkualitas dan teknik budidaya yang efisien, serta mendorong pengembangan sistem pertanian yang beragam dan berwawasan lingkungan, melalui integrasi tanaman utama—seperti jagung—dengan tanaman buah sebagai bentuk diversifikasi pendapatan.

Jagung dipilih sebagai komoditas utama karena memiliki nilai ekonomi yang stabil dan siklus tanam yang relatif singkat. Sementara itu, integrasi dengan tanaman buah-buahan memberikan potensi pendapatan tambahan jangka menengah, sekaligus meningkatkan efisiensi lahan dan keberlanjutan sistem pertanian. Kombinasi ini mendukung peningkatan ketahanan ekonomi petani serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Model bisnis yang diusulkan merupakan hasil dari proses partisipatif bersama pemangku kepentingan di Sub-lanskap Patimpeng, khususnya pelaku di tingkat tapak. Pemilihan ini mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang positif. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, model ini dirancang agar mampu menjawab kebutuhan lokal secara nyata dan aplikatif. Secara keseluruhan, pendekatan ini menawarkan kerangka kerja yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kapasitas petani, serta menjaga kelestarian sub-lanskap secara simultan dan berkelanjutan.

6.1. Pengembangan Usaha Berbasis Sub-Lanskap Berkelanjutan dan Potensi Lokal melalui Pendekatan Model Bisnis Terintegrasi Agroforestri Jagung

Sub-lanskap Patimpeng merupakan kawasan dengan dominasi lahan berstatus Area Penggunaan Lain (APL) sebesar ±96%, sementara sisanya berupa hutan produksi. Karakteristik biofisik wilayah ini yang berupa lahan tadah hujan menjadikannya cocok untuk budidaya tanaman pangan, terutama jagung dan padi. Jagung dipilih sebagai komoditas utama karena siklus tanamnya singkat, toleran terhadap kondisi defisit air, serta sesuai dengan agenda nasional untuk mendukung ketahanan pangan. Perluasan budidaya jagung secara signifikan juga tercermin dari pemanfaatan lahan eks-PTPN seluas 500 hektare, yang tersebar di Desa Mappesangka (sub-lanskap Bulutana), Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Kahu (Zonanusantara.com, 2025).

Namun, sistem produksi yang terlalu terpusat pada monokultur jagung akan menimbulkan berbagai tantangan ekologis dan agronomis. Pengurangan tutupan pohon akibat konversi lahan menyebabkan degradasi lingkungan, seperti peningkatan erosi, pendangkalan sungai, dan penurunan kualitas serta ketersediaan air. Di sisi lain, praktik monokultur meningkatkan kerentanan

terhadap serangan hama, penyakit, dan kegagalan panen, terutama di tengah perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Penggunaan pupuk kimia yang masif juga memperburuk kondisi tanah dan menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya adopsi sistem pertanian yang lebih beragam dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah penerapan agroforestri, yaitu integrasi jagung sebagai tanaman utama dengan pohon buah seperti mangga, alpukat, dan durian. Selain meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, sistem ini memungkinkan diversifikasi sumber pendapatan serta membantu memulihkan fungsi ekologis bentang lahan. Mangga telah umum dibudidayakan di kawasan ini, sedangkan durian dan alpukat terbukti adaptif terhadap curah hujan rendah dan cocok dikembangkan di wilayah sub-lanskap Patimpeng.

Sebagai bagian dari penerapan praktik budidaya unggul, intervensi agroforestri juga harus dibarengi dengan penguatan kemandirian benih berkualitas. Saat ini, petani masih bergantung pada benih dari luar atau menggunakan benih yang telah menurun kualitasnya akibat perbanyakan tidak terstandar. Padahal, keberhasilan budidaya, baik jagung maupun tanaman buah, sangat bergantung pada kualitas benih/bibit yang digunakan. Oleh karena itu, pengembangan sistem benih/bibit berbasis komunitas menjadi penting, tidak hanya untuk menjamin ketersediaan benih unggul yang adaptif terhadap kondisi lokal, tetapi juga untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kontrol petani atas sumber daya produksinya.

Penguatan kemandirian benih secara lokal juga akan mempercepat replikasi praktik budidaya unggul, termasuk penggunaan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Hal ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sistem agroforestri yang dikembangkan.

Selain itu, penerapan prinsip ekonomi sirkular menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan sistem agroforestri ini. Limbah jagung yang dihasilkan dari proses panen dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti pengolahan menjadi silase sebagai pakan ternak dan produksi pupuk organik melalui komposting. Pemanfaatan limbah jagung tersebut tidak hanya mengurangi limbah pertanian yang berpotensi mencemari lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi sumber daya dan memperbaiki kesuburan tanah secara alami. Oleh sebab itu, integrasi ekonomi sirkular dalam budidaya jagung dapat memperkuat ketahanan ekologis sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi petani.

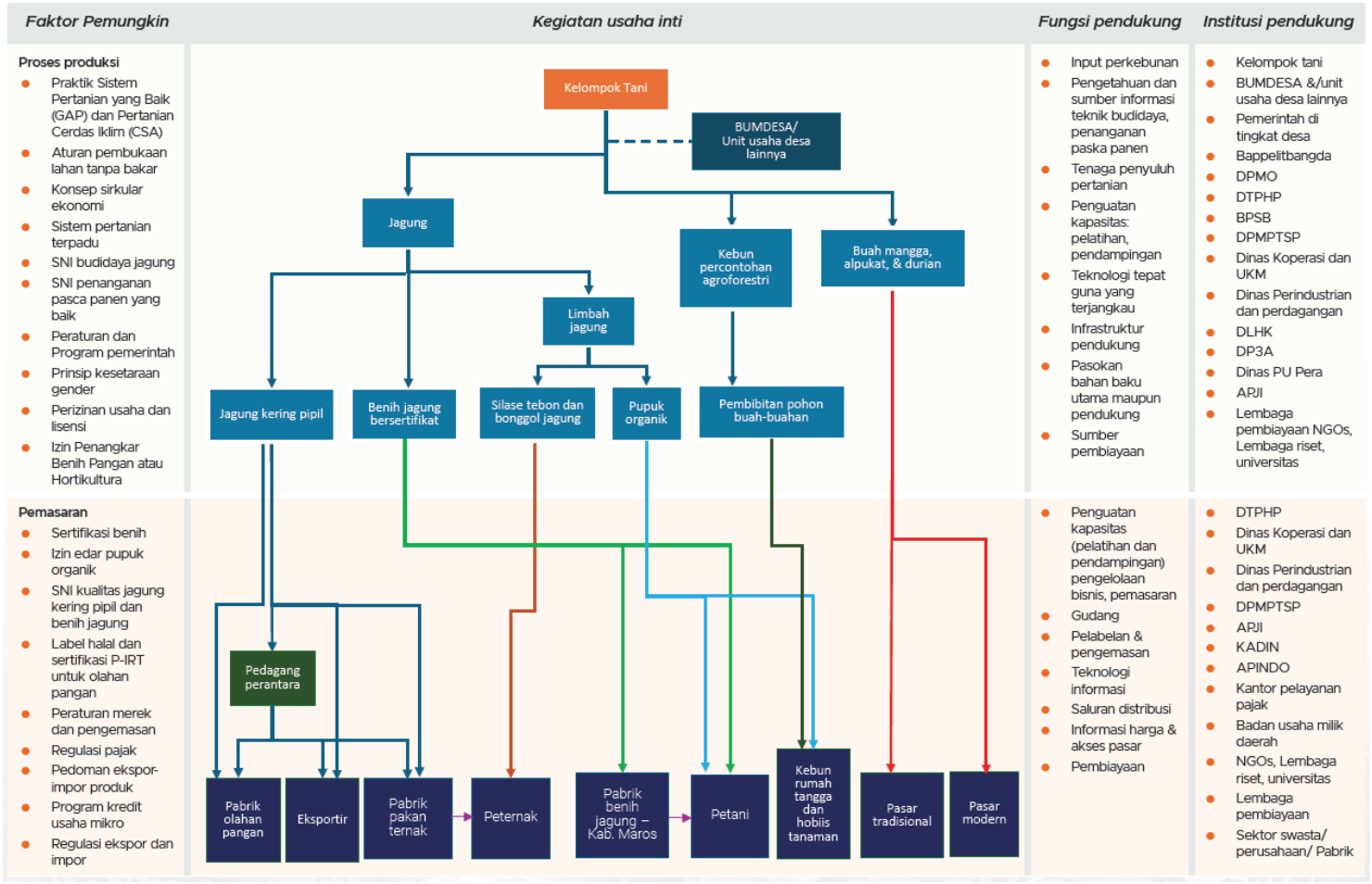
Sejalan dengan itu, pengembangan agroforestri berbasis jagung dan buah-buahan di sub-lanskap Patimpeng, yang ditopang oleh kemandirian benih, praktik budidaya unggul, serta penerapan ekonomi sirkular, merupakan strategi

terpadu yang menjawab tantangan ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan. Pendekatan ini diharapkan menjadi fondasi bagi transformasi sistem pertanian lokal menuju arah yang lebih resilien, berkelanjutan, dan berdaya saing.

6.2. Rancangan Model Bisnis

Model ini terdiri dari empat komponen utama yang saling mendukung, membentuk kerangka usaha tani yang terencana, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang:

1. Kegiatan Inti berfokus pada pengembangan sistem agroforestri dengan jagung sebagai komoditas utama yang diterapkan melalui teknik budidaya unggul, serta diintegrasikan dengan tanaman buah seperti mangga, alpukat, dan durian. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, memulihkan fungsi ekologi kawasan, dan mendiversifikasi pendapatan petani;
2. Faktor pemungkin meliputi pedoman teknis dan regulasi yang mendukung penerapan agroforestri. Regulasi ini menjadi landasan legal dan administratif bagi implementasi serta kemungkinan perluasan atau replikasi model usaha;
3. Pada fungsi pendukung, dukungan teknis meliputi penguatan kapasitas dan pengetahuan petani, penyediaan sarana produksi seperti pembibitan, pupuk organik, dan alat budidaya, serta fasilitasi akses pasar. Selain itu, pendampingan rutin diberikan kepada petani untuk membantu adopsi teknologi pertanian yang adaptif dan efisien, termasuk pengembangan kebun percontohan sebagai media belajar dan penerapan inovasi. Dukungan infrastruktur juga menjadi bagian penting, yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, penerangan, serta jaringan komunikasi.
4. Institusi pendukung terdiri dari aktor kunci yang memiliki peranan masing-masing, antara lain mendukung penguatan kapasitas petani, mendorong inovasi untuk memperbaiki keunggulan kompetitif (meliputi kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga yang bersaing) serta keunggulan komparatif (melalui budidaya yang efisien dan efektif), menyediakan akses pembiayaan, teknologi, dan akses pasar, serta menjalankan fungsi koordinasi antar pemangku kepentingan. Institusi pendukung ini juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan model bisnis melalui kemitraan strategis yang menguntungkan semua pihak.



Gambar 15. *Gambar . Model bisnis agroforestri berbasis jagung*

Jagung memiliki potensi pasar yang besar, baik dalam bentuk jagung pipil kering maupun benih bersertifikat. Jagung pipil kering dapat dipasok ke pabrik pakan ternak di Sulawesi Selatan, yang menyerap sekitar 50% dari produksi jagung pipil kering di provinsi ini (Dit. Pakan Ditjen PKH Kementan, 2024). Selain itu, jagung pipil kering juga dapat dipasarkan melalui pedagang perantara atau langsung ke pabrik pengolahan pangan dan eksportir. Kebutuhan jagung kering dalam negeri Indonesia lumayan tercukupi dari produksi dalam negeri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 di mana volume impor hanya berkisar 1,23 juta ton (8,31% dari total produksi), sedangkan ekspor jagung di tahun yang sama sebesar 92,05 ribu ton setara dengan 0,62% dari total produksi jagung (Dit. Pakan Ditjen PKH Kementan 2024). Terdapat potensi untuk Indonesia meningkatkan pasar ekspor di mana negara-negara eksportir utama dunia seperti Amerika sedang mengalami penurunan produksi akibat cuaca dan perubahan iklim (Pusdatin Kementan, 2024). Negara-negara pengimportir jagung kering terbesar saat ini yang dapat menjadi pasar sasaran diantaranya Cina, Meksiko, Jepang dan Korea Selatan (Pusdatin Kementan, 2024). Untuk benih jagung bersertifikat yang dihasilkan nantinya tidak hanya digunakan oleh petani di sub-lanskap Patimpeng, tetapi juga dapat dipasarkan ke petani lain atau ke pabrik benih di Pucak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Limbah jagung, yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, memiliki potensi untuk diolah menjadi pakan ternak atau pupuk organik. Pakan ternak berbasis limbah jagung dapat digunakan oleh petani di sub-lanskap Patimpeng yang juga menggeluti peternakan sapi atau dipasarkan ke peternak lain. Potensi implementasi pengolahan limbah jagung menjadi pakan ternak sangat besar mengingat Sulawesi Selatan adalah produsen ternak terbesar di Sulawesi dan sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia dengan populasi sapi potong mencapai 814 ribu ekor pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Pemanfaatan limbah jagung sebagai pupuk organik selain nantinya dipergunakan di lahan petani dari sub-lanskap Patimpeng, juga dapat dipasarkan ke petani lainnya. Pasar pupuk organik saat ini masih menyimpan potensi pasar dalam negeri yang cukup besar, mengingat sering terjadinya kelangkaan dan tingginya harga jual pupuk di pasaran. Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia pada tahun 2023 masih mengimpor pupuk sebanyak 5.367 ton dari beberapa negara, dengan Cina sebagai negara eksportir terbesar, diikuti oleh Rusia dan Kanada.

Sementara itu, hasil buah-buahan dapat dipasarkan melalui pasar tradisional atau modern, membuka peluang diversifikasi pendapatan bagi petani. Meskipun alpukat telah dibudidayakan di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, secara kualitas dan kuantitas produksinya ternyata belum mencukupi sehingga masih perlu didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Untuk produk durian dan mangga lokal sudah mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pasar di Sulawesi Selatan, bahkan sering dipasarkan ke provinsi lain di Pulau Sulawesi.

Dalam upaya meningkatkan produksi, kebun percontohan memegang peran vital sebagai pusat pembibitan bibit unggul buah-buahan yang tidak hanya meningkatkan mutu dan kuantitas hasil, tetapi juga memperluas peluang pemasaran serta secara strategis meningkatkan kapasitas petani dalam menghasilkan bibit berkualitas, sekaligus mendukung keberlanjutan sistem agroforestri. Potensi pasar bibit unggul ini sangat besar, mulai dari tingkat kabupaten/provinsi hingga nasional, mengingat masih banyak pembudidaya yang menggunakan bibit dengan kualitas rendah, yang berdampak negatif pada volume dan mutu panen.

6.3. Analisis Profitabilitas

Analisis manfaat ekonomi dalam penggunaan lahan dan usaha tani menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode *Land Use Profitability Assessment* (LUPA) yang dikembangkan oleh ICRAF/World Agroforestry, kajian ini mengukur profitabilitas model usaha tani sebagai indikator nilai pengembalian dari kegiatan penggunaan lahan. Indikator performa ekonomi yang digunakan tertera pada Gambar 16.

Indikator yang digunakan:

- ***Net Present Value:*** keuntungan (profit) terdiskonto selama kegiatan usaha dijalankan yang dijadikan nilai saat ini, selisih antara penerimaan terhadap biaya
- Diskonto: normalisasi nilai keuntungan masa depan ke masa kini.
- ***Equal Annual Equivalent (EAE):*** digunakan untuk membandingkan keuntungan SUT yang memiliki siklus hidup berbeda. EAE adalah ekivalen rata-rata NPV per tahun yang terdiskonto.
- ***Return to Labour:*** menunjukkan imbalan terhadap tenaga kerja yang diperoleh dari usaha tani atau tingkat upah.
- ***Internal Rate of Return (IRR):*** tingkat efisiensi dari sebuah investasi dan menjadi alat ukur kemampuan usaha tani dalam mengembalikan bunga pinjaman.
- ***Benefit Cost Ratio:*** Efisiensi dari usaha yang dilakukan. Membandingkan manfaat atau pendapatan kotor yang dengan biaya total (telah terdiskonto).
- ***Payback Period:*** Estimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal yang dibuat untuk sebuah proyek.

Gambar 16. *Indikator performa ekonomi yang digunakan*

Profitabilitas tidak hanya mencerminkan keuntungan finansial, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan keunggulan komparatif dan kompetitif dari berbagai sistem penggunaan lahan. Simulasi dilakukan untuk memperkirakan manfaat ekonomi dari strategi pengelolaan lahan berkelanjutan dan model bisnis yang diterapkan.

Pada analisis ini, disimulasikan sistem usaha tani terpadu ini selama 30 tahun dengan menggunakan asumsi *discount rate* 7,11% dan upah tenaga kerja Rp120.000/HOK. Kemudian hasil ini dibandingkan dengan kondisi apabila masyarakat hanya melakukan usaha penanaman jagung secara tradisional.

Sebagai bagian dari pendekatan berkelanjutan, kajian ini menggambarkan potensi jagung monokultur yang ditanami pohon buah-buahan dengan harapan meningkatkan pendapatan petani dan konservasi lahan pertanian jagung yang saat ini dilakukan secara massif.

Tabel 2. *Komposisi Sistem Usaha Tani Agroforestri Berbasis Jagung dan Buah-Buahan*

Komoditas	Jarak Tanam (m)	Jumlah Tanaman	Mulai Panen	Satuan	Harga Jual (Rp)
Jagung: Jagung kering	Luasan 1 Ha: tahun 1–3 0,9 Ha: tahun 4–6 0,7 Ha: tahun 7–8 0,5 Ha: tahun 10–16 0,3 Ha: tahun 17–20		Setelah 4 bulan, 2 tahun sekali	kg	3,900
Durian : Buah Durian	10 x 10	15 pohon	Tahun ke-10	Buah	Ukuran Kecil 8.000/buah Sedang: 16.000/buah Besar 35.000/buah
Alpukat: Buah Alpukat	9 x 9	15 pohon	Tahun ke-6	kg	10.000/kg
Mangga: Buah Mangga	8 x 8	15 pohon	Tahun ke-6	kg	8.000/kg

Jagung ditanam selama tahun ke-1 s.d 20 dengan luasan yang terus berkurang karena mempertimbangkan luasan kanopi pohon buah yang akan terus membesar dari tahun ke tahun. Jagung ditanam 2× musim tanam/tahun. Pohon buah-buahan ditanam pada tahun yang sama dengan jumlah, jarak tanam tertera pada tabel 2. Biaya yang dibutuhkan meliputi kebutuhan input produksi seperti pemupukan, pestisida, herbisida, peralatan, bibit serta tenaga kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3. *Kebutuhan Tenaga Kerja dan Input Produksi*

Tahapan Budidaya	Kebutuhan tenaga kerja (HOK/tahun)			Kebutuhan Input Pertanian
	Fase 1: Tahun ke 1–10	Fase 1: Tahun ke 11–20	Fase 1: Tahun ke 21–30	
Pembukaan lahan tanpa bakar	10			
Jagung (2× musim tanam)				
Penggemburan tanah				
Penanaman	238.00	117.60		Bibit 1 Ha: 40 kg/tahun 0,9 Ha: 36 kg/tahun 0,7 Ha: 28 kg/tahun 0,5 Ha: 20 kg/tahun 0,3 Ha: 12 kg/tahun
Penyemprotan	238.00	117.60		Pestisida 1 Ha: 2 L/tahun 0,9 Ha: 1,8 L/tahun 0,7 Ha: 1,4 L/tahun 0,5 Ha: 1 L/tahun 0,3 Ha: 0,6 L/tahun Herbisida 1 Ha: 4 L/tahun 0,9 Ha: 3,6 L/tahun 0,7 Ha: 2,8 L/tahun 0,5 Ha: 2 L/tahun 0,3 Ha: 1,2 L/tahun Pestisida Nabati 1 Ha: 4 L/tahun 0,9 Ha: 3,6 L/tahun 0,7 Ha: 2,8 L/tahun 0,5 Ha: 2 L/tahun 0,3 Ha: 1,2 L/tahun
Pemupukan	72.00	33.60		Urea Subsidi 1 Ha: 500 kg/tahun 0,9 Ha: 450 kg/tahun 0,7 Ha: 350 kg/tahun 0,5 Ha: 250 kg/tahun 0,3 Ha: 150 kg/tahun NPK Subsidi 1 Ha: 400 kg/tahun 0,9 Ha: 360 kg/tahun 0,7 Ha: 180 kg/tahun 0,5 Ha: 200 kg/tahun 0,3 Ha: 120 kg/tahun

Tahapan Budidaya	Kebutuhan tenaga kerja (HOK/tahun)			Kebutuhan Input Pertanian
	Fase 1: Tahun ke 1–10	Fase 1: Tahun ke 11–20	Fase 1: Tahun ke 21–30	
				Pupuk Organik Padat 1 Ha: 2.000 kg/tahun 0,9 Ha: 1.800 kg/tahun 0,7 Ha: 1.400 kg/tahun 0,5 Ha: 1.000 kg/tahun 0,3 Ha: 600 kg/tahun
Pembubunan akar	68.00	33.60		
Penyemprotan insektisida	127.50	63.00		1 Ha: 2 L/tahun 0,9 Ha: 1,8 L/tahun 0,7 Ha: 1,4 L/tahun 0,5 Ha: 1 L/tahun 0,3 Ha: 0,6 L/tahun
Pembersihan lahan	127.50	63.00		
Pemanenan	51.00	25.20		
Pasca panen	510.00	252.00		
Durian				
Penanaman	1			15 bibit
Pemupukan	20	20	20	Pupuk Kandang 150 kg/tahun NPK Subsidi 150 kg/tahun
Pembersihan lahan selama panen	4.00	40.00	40.00	
Panen	8.25	157.93	167.95	
Mangga				
Penanaman	1.00			15 bibit
Pemangkasan	15.00	30.00	30.00	
Pemupukan	10.00	10.00	10.00	Pupuk kandang 30 kg/tahun NPK subsidi 150 kg/tahun KCL 30 kg/tahun
Pemanenan	59.13	197.10	197.10	
Alpukat				
Penanaman	1.00			15 bibit
Pemupukan	10.00	10.00	10.00	Pupuk kandang 30 kg/tahun
Pemanenan	15.00	30.00	30.00	

Tabel 4. *Kebutuhan Biaya Tahunan dan Total Biaya Selama 30 Tahun*

Jenis Biaya	Harga Satuan (Rp)	Rata-Rata Biaya Tahunan (Rp/Ha/Tahun)			Biaya 30 Tahun (Rp/Ha)
		Fase 1: Tahun 1–10	Fase 2: Tahun 11–20	Fase 3: Tahun 21–30	
Input Produksi					
Urea Subsidi	2.400/kg	1.036.200	504.000		16.002.000
NPK Subsidi	3.000/kg	1.897.750	1.404.000	508.500	39.602.500
Pestisida, Insektisida, Herbisida	Herbisida: 80.000/Liter Insektisida: 80.000/Liter Pestisida: 123.500/Liter	617.950	305.340		9.694.545
Pupuk Organik	1.000/kg	1.700.000	840.000		26.670.000
Pestisida Nabati	75.000/kg	255.000	126.000		4.000.500
Pupuk Kandang	780/kg	163.800	163.800	306.900	6.556.500
KCL	8.000/kg	240.000	240.000	240.000	6.240.000
Bibit Jagung	120.000/kg	4.080.000	2.016.000		60.960.000
Bibit Pohon Durian	100.000/bibit	1.650.000			3.300.000
Bibit Pohon Mangga	50.000/bibit	825.000			1.650.000
Bibit Pohon Alpukat	100.000/bibit	1.650.000			3.300.000
Peralatan		2.770.100	2.364.000	2.344.000	74.201.000
Tenaga Kerja					
Persiapan Lahan & Penanaman	120.000/HOK	5.868.000	2.822.400		86.904.000
Pemeliharaan	120.000/HOK	6.012.000	3.460.800	840.000	103.128.000
Panen & Pasca Panen	120.000/HOK	7.768.560	8.426.743	5.220.557	214.158.600

Peralatan yang dibutuhkan untuk keseluruhan sistem ini adalah cangkul, parang, sprayer, sekop, terpal, linggis, sabit, ember, karung, alat tanam jagung, galah bambu untuk panen buah, keranjang, parang babat dan guris untuk durian. Biaya peralatan diestimasi sebesar Rp74.201.000 selama 30 tahun dan merupakan 11% dari kebutuhan biaya total. Biaya terbesar adalah untuk tenaga kerja yaitu sebesar 62% dan diikuti dengan input produksi sebesar 27%. Tenaga kerja dibedakan atas tenaga kerja untuk persiapan lahan yang merupakan rangkaian pembukaan lahan dan pengolahan tanah yang dilakukan dengan tanpa membakar. Dilanjutkan dengan penanaman yang terdiri atas penyemaian, pembuatan lubang dan penanaman jagung dan penanaman pohon buah-buahan. Lalu pemeliharaan adalah kegiatan pemupukan jagung, pemupukan pohon buah, pembersihan lahan, penyemprotan dengan bahan kimia dan

organik, pemangkasan ranting pohon buah selanjutnya tahapan akhir adalah pemanenan dan pasca panen. Jagung setelah di panen, di pipil kemudian di jemur karena dijual dalam bentuk kering. Biaya tenaga kerja terbesar dibutuhkan untuk sesi pemanenan dan pasca panen (53% dari kebutuhan biaya), diikuti dengan pemeliharaan (26%) dan persiapan lahan serta penanaman (22%).

Dengan asumsi bahwa seluruh produk yang dihasilkan dapat dijual, estimasi produksi seluruh tanaman bila usaha ini dilakukan selama 30 tahun tertera pada Tabel 5. Sisa tanaman dan pembersihan lahan jagung digunakan sebagai pupuk bagi pohon buah lainnya dan dikembalikan ke tanah kembali untuk penanaman musim selanjutnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pupuk organik.

Tabel 5. *Produktivitas Sistem Usaha Tani*

Komoditas	Rata-Rata Produktivitas			Total Pendapatan Kotor Selama 5 Tahun
	Fase 1: Tahun 1–10	Fase 2: Tahun 11–20	Fase 3: Tahun 21–30	
Jagung: Jagung kering (kg/tahun)	10.710	5.292		624.078.000
Buah Durian kecil (buah/tahun)	330	660	681	109.890.000
Buah Durian sedang (buah/tahun)	165	330	392	118.140.000
Buah Durian besar (buah/tahun)	83	116	103	79.406.250
Buah Alpukat (kg/ tahun)	400	458	429	108.712.500
Buah Mangga (kg/ tahun)	185	594	1.044	138.450.000

Hasil indikator performa ekonomi terhadap bisnis ini serta perbandingan dengan sistem monokultur dengan praktik tradisional adalah sebagai berikut.

Tabel 6. *Indikator performa ekonomi*

Indikator Ekonomi	Jagung Monokultur (Tradisional) 5 Tahun	Agroforestri Jagung & Buah-Buahan (GAP) 30 Tahun
Net Present Value (Rp/Ha)	55.329.656	188.586.894
Equivalent Annual Earnings (Rp/Ha/Thn)	13.566.730	15.504.009
Return to Labour (Rp/HOK)	209.574	237.782
Gross Benefit Cost Ratio	1.40	1,56
Biaya Investasi (Rp/Ha)	43.365.000	48.171.800
Total Kebutuhan Tenaga Kerja (Hari Orang Kerja)	2.037	3.368


Foto oleh Landscape Alliance

Hasil perhitungan profitabilitas sistem agroforestri berbasis jagung kemudian dibandingkan dengan kondisi jagung monokultur yang dikelola dengan sistem tradisional. Pendapatan tahunan ekuivalen (*Equivalent Annual Earnings*) menunjukkan rata-rata keuntungan yang dapat diperoleh per hektare setiap tahunnya. Nilai ini mencerminkan kemampuan sistem dalam memberikan aliran pendapatan yang stabil bagi petani selama periode yang dianalisis. Pengelolaan jagung dengan buah-buahan menghasilkan keuntungan tahunan yang lebih tinggi 14,2% dibandingkan jagung monokultur yang dikelola secara tradisional, menunjukkan bahwa dengan keputusan menanam pohon buah-buahan dapat bersaing dengan praktik jagung yang selama ini dilakukan. Hasil ini juga ditunjukkan dengan indikator *Gross BCR* pada agroforestri yang lebih tinggi. Semakin tinggi nilai, semakin besar keuntungan bersih yang diharapkan dari investasi di lahan pertanian yang dikelola dalam periode tertentu. Selain itu, Perubahan biaya pembangunan atau investasi di awal juga tidak terlalu tinggi yaitu naik 11%.

Sistem agroforestri lebih menguntungkan bagi tenaga kerja, karena memberikan pendapatan per hari kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem monokultur jagung. Ini bisa menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani atau pekerja pertanian. Nilai ini juga lebih besar dari upah rata-rata di sektor lain yang menunjukkan usaha ini mampu bersaing dengan usaha lainnya dalam hal tenaga kerja. Kebutuhan total tenaga kerja (HOK) menunjukkan tingkat intensitas pekerjaan yang diperlukan dalam sistem budidaya. Agroforestri membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak karena kompleksitas dari pengelolaan dan operasional usaha secara keseluruhan.

Penerapan Model Bisnis Jagung Agroforestri & Pohon Buah-Buahan membutuhkan strategi pengelolaan biaya yang tepat agar sistem ini dapat berjalan secara efektif dan menguntungkan. Beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan meliputi:

- Biaya tetap dalam SUT berupa bibit unggul, alat dan tenaga kerja yang dilakukan menyeluruh untuk lahan seluas 1 ha. Biaya variabel meliputi tenaga kerja, pupuk untuk pemeliharaan tanaman.
- Biaya investasi pada agroforestri lebih tinggi karena adanya penambahan tanaman buah-buahan yang menggunakan bibit unggul, pemupukan serta tenaga kerja untuk penanaman dan pemeliharaan. Untuk mengurangi beban biaya bibit, diperlukan dukungan bibit subsidi serta pelatihan perbanyakan vegetatif bagi petani agar produktivitas tinggi, lebih tahan serangan hama dan penyakit serta biaya pengadaan tidak terlalu besar.
- Produktivitas jagung dan pohon buah-buahan bergantung pada pemupukan berimbang menggunakan pupuk kandang, kompos, dan pupuk kimia. Agar kebutuhan pupuk terpenuhi, dibutuhkan pupuk subsidi yang kontinu, pelatihan pembuatan kompos, serta pemanfaatan pupuk kandang dari ternak masyarakat. Jumlah pupuk yang diperlukan akan menyesuaikan dengan jumlah bibit dan target produktivitas.
- Biaya pemeliharaan dan pemanenan komoditas pertanian sangat tinggi, diperlukan cara dan peralatan yang lebih efisien untuk menekan biaya ini, misalnya dengan subsidi alat pertanian modern dan penyuluhan mengenai praktik budidaya yang baik.

Dengan strategi yang tepat dalam pengelolaan biaya, dukungan pelatihan, dan efisiensi proses, model bisnis ini dapat menjadi sistem yang lebih produktif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi petani.

07.
Sistem Pemantauan dan Evaluasi


Foto oleh Landscape Alliance

Sistem pemantauan dan evaluasi (M&E) partisipatif untuk Sub-lanskap Patimpeng dirancang sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan, efektivitas, dan dampak dari inisiatif-inisiatif pengelolaan lanskap yang dilaksanakan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan adaptasi, yang melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan prosesnya.

Sistem M&E partisipatif ini dibangun atas beberapa prinsip dasar. Pertama, partisipasi inklusif menjadi fondasi utama, memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Sub-lanskap Patimpeng. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dijunjung tinggi, dengan menyediakan akses informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak. Ketiga, pembelajaran adaptif menjadi orientasi utama, dengan menggunakan hasil M&E untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi pengelolaan lanskap secara berkelanjutan. Keempat, penggunaan metode campuran diterapkan, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas sistem M&E partisipatif ini, diperlukan mekanisme kelembagaan yang kuat. Kelompok kerja Pengelolaan Bentang Lahan Kabupaten Bone dibentuk sebagai wadah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan M&E. Kelompok kerja ini beranggotakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, pemerintah daerah menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan M&E.

Sistem M&E partisipatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan Sub-lanskap Patimpeng. Pertama, tentang kondisi dan perubahan lanskap. Kedua, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan, memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lanskap. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan lanskap. Keempat, mendorong pembelajaran dan adaptasi dalam pengelolaan lanskap. Kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lanskap. Dengan demikian, sistem M&E partisipatif ini menjadi alat yang penting untuk mewujudkan pengelolaan sub-lanskap Patimpeng yang berkelanjutan dan inklusif.

Strategi 1 – Praktik Budidaya Unggul

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Sub-lanskap Patimpeng sebesar 25% pada tahun 2035. Beberapa komoditas dipilih untuk dikembangkan dengan sistem agroforestri, di antaranya durian, kakao, mangga, cengkeh dan kelapa. Pelaksanaannya akan dimotori oleh Dinas Pertanian dan Kelompok Tani, dan didukung oleh pemerintah desa.

Tabel 7. *Monitoring dan evaluasi strategi 1– Praktik Budidaya Unggul*

ID	Intervensi/ Aktivitas	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
1	Praktik Budidaya Unggul	Pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan Masyarakat sebesar 25 % melalui komoditas durian,kakao, mangga, cengkeh, kelapa di tahun 2035	Dinas Pertanian, Kelompok Tani	Pemerintah Desa
1.1	Pelatihan dan pendampingan kelompok tani	Jumlah pelatihan dan pendampingan yang dilakukan	Minimal 5 sesi pelatihan per tahun	PPL, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi	Pemerintah Desa

ID	Intervensi/ Aktivitas	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
1.1.1	Perbaikan akses modal pengelolaan lahan	Jumlah petani yang mendapatkan akses kredit	Minimal 100 petani mendapatkan akses permodalan	Bank, Dinas Pertanian, Koperasi Petani, Pemerintah Desa	Lembaga desa
1.2	Bibit unggul	Jumlah varietas unggul yang dikembangkan	Minimal 3 varietas unggul	Balai Penelitian, Dinas Pertanian	Kelompok Tani, Pemerintah Desa
1.2.1.	Perbaikan akses pasar untuk petani	Jumlah kelompok tani yang memiliki jaringan pemasaran	Minimal 70% kelompok tani memiliki akses pasar yang baik	Pemerintah Desa	Koperasi, Distributor, Pasar Lokal
1.2.2	Pembibitan dan penanaman	Luas lahan yang dikembangkan untuk buah-buahan	100 Ha	kelompok tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Balai sertifikasi - Kementrian Pertanian
1.2.3	Pengembangan pohon buah unggul sebagai sumber entrees	Jumlah entres yang dihasilkan	Minimal 5000 entres ditanam	Kelompok Tani, Dinas Pertanian	Pemerintah Desa

Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Tani

Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani melalui pelatihan dan pendampingan secara sinergis oleh Penyuluh Pertanian Lapang (PPL), Dinas Pertanian dan Perguruan Tinggi. Dengan target lima sesi pelatihan per tahun untuk setiap tahun, diharapkan kapasitas kelompok tani untuk melakukan budidaya pertanian yang baik dapat meningkat dan produktivitas lahan dan komoditas semakin baik.

Bibit unggul

Intervensi ini berupaya untuk mengembangkan varietas unggul yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bibit setiap kelompok tani. Target 3 varietas unggul ini diharapkan dapat tercapai melalui kerjasama yang baik antara Balai Penelitian Pertanian Perkebunan, Dinas Pertanian, Kelompok Tani dan Pemerintah Desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan pohon buah unggul sebagai sumber entrees dengan target minimal 5.000 entrees ditanam oleh kelompok tani yang didukung oleh Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa.

Kemudian, perlu juag didukung dengan pembibitan dan penanaman. Dengan target penanaman seluas 100 hektare dengan pohon buah-buahan, kelompok tani akan didukung oleh Dinas Pertanian dan Balai Sertifikasi Kementerian Pertanian. Intervensi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan, baik secara individu maupun melalui kelompok tani, untuk terlibat dalam pengembangan kebun percontohan, terutama pada proses persemaian dan perawatan hingga menjadi bibit. Sedangkan kelompok laki-laki menyiapkan media tanam dan membangun kebun.

Selain itu, diperlukan juga perbaikan akses pasar agar minimal 70% kelompok tani, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memasarkan hasil pertanian dan kebun dengan harga yang baik. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa yang bekerjasama dengan koperasi, distributor dan pasar lokal.

Strategi 2 – Akses lahan untuk penghidupan

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara legal melalui perhutanan sosial (PS). Targetnya, pendapatan masyarakat sekitar hutan melalui lima kelompok PS dapat naik sebesar 30%. Hal ini menjadi tanggung jawab KPH dan didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Perhutanan Sosial Makassar.

Tabel 8. *Monitoring dan evaluasi strategi 2*

ID	Intervensi/ aktivitas	Indikator	Target	Penanggung jawab	Instansi pendukung
3	Mendorong peningkatan akses lahan melalui perhutanan sosial	Pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan Masyarakat desa hutan sebesar 30% melalui pengelolaaan hutan oleh 5 kelompok perhutanan sosial pada tahun 2035	KPH	DLHK, Balai PS
3.1	Pengajuan persetujuan izin PS	Luas perhutanan sosial yang dikelola oleh KTH/KUPS	180 ha	Calon KTH	KPH, Balai PS
3.1.1	Pendampingan intensif pengajuan PS	Meningkatnya jumlah KTH yang izin PS-nya disetujui	100%	KTH	KPH, DLHK

ID	Intervensi/ aktivitas	Indikator	Target	Penanggung jawab	Instansi pendukung
3.2	Peningkatan kapasitas pengelolaan	Luas areal PS yang dikeloa dengan baik	180 ha	KTH	KPH, DLHK
3.2.1	Penyusunan RKPS	Tersusunnya RKPS	100%	KTH	KPH, DLHK

Intervensi yang perlu dilakukan adalah pendampingan intensif pengajuan izin pengelolaan PS dan peningkatan kapasitas pengelolaan dengan penyusunan RKPS setelah mendapatkan izin. Hal ini menjadi tanggung jawab Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan pendampingan oleh KPH dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Strategi 3 – Peningkatan akses terhadap sumber air pertanian

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya air, terutama untuk petani. Strategi ini menargetkan minimal 100 petani dapat mendapatkan akses air pada tahun 2035 dan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian yang didukung oleh Dinas BMCKTR.

Tabel 9. *Monitoring dan evaluasi strategi 3*

ID	Intervensi/ Aktivitas	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
3	Peningkatan akses terhadap sumber air	Jumlah petani yang mendapatkan akses air	Minimal 100 petani	Dinas Pertanian,	Dinas BMCKTR
3.1	Penghijauan dengan agroforestri buah-buahan	Area penghijauan dengan agroforestri buah-buahan	30% area sub-lanskap pada tahun 2035	Kelompok Tani	Dinas Pertanian, Pemerintah desa
3.1.1	Pembibitan dan persemaian	Kebun bibit dan persemaian	1 di setiap desa	Kelompok Tani	Dinas Pertanian, Pemerintah desa, Dinas LH
3.2	Konservasi tanah dan air	Perbaikan kualitas tanah dan air	Kualitas tanah dan air meningkat 25% pada tahun 2035	Kelompok Tani	Dinas LH, Pemerintah desa, Dinas BMCKTR, LSM/ Mitra
3.2.1	Pembangunan bangunan KTA sipil teknis (pembuatan jebakan air, embung mini)	Dibangunnnya embung, jebakan air, embung mini	50% area yang memerlukan KTA	Kelompok Tani	Pemerintah desa, Dinas BMCKTR, LSM/ Mitra
3.2.2	Pemanenan air hujan	Sistem pemanenan air hujan terpasang	1 unit setiap kelompok	Kelompok Tani	Dinas BMCKTR, Dinas Pertanian

Penghijauan dengan agroforestri buah-buahan

Masyarakat Sub-lanskap Patimpeng menginginkan areanya dihijaukan dengan berbagai pepohonan buah-buahan dengan sistem agroforestri seluas 30% dari luasan Sub-lanskap. Hal ini akan dilaksanakan oleh kelompok tani dengan dukungan Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa.

Intervensi ini juga memerlukan kegiatan pembibitan dan persemaian yang akan diwujudkan melalui satu kebun bibit di setiap desa dengan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok tani.

Konservasi tanah dan air

Konservasi tanah dan air penting dilakukan sebagai upaya jangka panjang untuk mengembalikan kualitas tanah dan air. Salah satunya melalu intervensi bangunan KTA sipil teknis, seperti pembuatan jebakan air dan embung mini.

Selain itu pemanenan air hujan juga dapat dilakukan untuk menambah pasokan air, terutama di areal pertanian. Sistem pemanenan air hujan (*Rainwater harvesting systems*-RWHS) telah digunakan di berbagai tempat. Pemanenan air hujan menjadi salah satu strategi adaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus untuk memenuhi kebutuhan air yang semakin meningkat

08.
Penutup


Foto oleh Landscape Alliance

Rencana Pengelolaan Sub-Lanskap Patimpeng kini menghadapi tantangan penting pada tahap implementasi yang memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Tindak lanjut dari rencana ini harus diarahkan pada penerapan strategi secara terukur dan berkelanjutan agar potensi alam dan sumber daya sosial budaya dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Penguatan kapasitas teknis di tingkat desa dan dukungan regulasi menjadi penting untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan target dan indikator yang sudah terukur.

Pemanfaatan rencana ini juga harus memperhatikan sinergi antar pihak, di mana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pengarah arah kebijakan, sementara masyarakat dan sektor swasta bertindak sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya. Kolaborasi yang terjalin selama penyusunan rencana perlu dilanjutkan dalam bentuk kemitraan operasional yang konkret, termasuk dalam pengembangan usaha pertanian berkelanjutan, konservasi tanah dan air serta penguatan kapasitas kelembagaan dan kelompok masyarakat. Keberhasilan pengelolaan tidak hanya bergantung pada sumber daya, tetapi juga pada kebersamaan dalam menjalankan peran masing-masing.

Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi berkala harus dijadikan bagian integral dari proses pelaksanaan agar setiap dinamika di lapangan dapat segera direspons dengan tepat. Hal ini penting untuk pemeliharaan keberlanjutan program dan penyesuaian strategi sesuai perkembangan kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Penerapan mekanisme monitoring partisipatif akan mempermudah pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pengelolaan lanskap secara berkelanjutan.

Integrasi rencana ini ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Kabupaten Bone harus menjadi prioritas strategis. Sinergi ini tidak hanya memastikan alokasi sumber daya dan pendanaan yang memadai, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kesinambungan program dalam jangka panjang. Pendekatan terintegrasi ini juga membuka ruang bagi pengawasan yang lebih sistematis serta pengelolaan risiko yang mendukung pengembangan lanskap secara adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada.

Akhirnya, keberhasilan penerapan Rencana Pengelolaan Sub-lanskap Patimpeng memerlukan komitmen aktif dan konsisten dari semua *stakeholders* secara berkelanjutan. Pelibatan intensif masyarakat lokal, dukungan aktif pemerintah, dan keterbukaan sektor swasta akan menjadi kunci utama dalam mengawal pemanfaatan lanskap yang asri, sehat, dan lestari. Dengan demikian, rencana ini bukan hanya sebuah dokumen, melainkan menjadi panduan nyata untuk perubahan positif dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Sub-lanskap Patimpeng

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone. 2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025–2045.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone. 2024. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025–2030.

Badan Pusat Statistik. 2024. Kabupaten Bone Dalam Angka. 2024. Penerbit Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. Watampone.

Badan Pusat Statistik. 2024. Kecamatan Patimpeng dalam Angka 2024. Penerbit Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik impor pupuk Indonesia 2023. BPS. Diakses dari https://bps.go.id.

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik peternakan Sulawesi Selatan 2024. BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses dari https://sulsel.bps.go.id.

Direktorat Pakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian. (2024). Pemanfaatan Jagung Lokal Oleh Industri Pakan Tahun 2021. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian. (2024). Situasi dan prospek produksi jagung nasional. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Diakses dari https://pusdatin.pertanian.go.id.

Zonanusantara.com. (2025). Bupati Bone gerak cepat! Tanam perdana jagung di 500 hektar lahan PTPN. Diakses dari https://zonanusantara.com/bupati-bone-gerak-cepat-tanam-perdana-jagung- di-500–hektar-lahan-ptpn.



Foto oleh Landscape Alliance

Lampiran

Lampiran 1. Dokumentasi Proses



Lampiran 2. Berita Acara

Berita Acara

Lokakarya Konsultasi Publik
Menuju Pengelolaan Bentang Lahan Berkelanjutan Kabupaten Bone
Watampone, 28 Mei 2025

Sublanskap Patimpeng-Kahu

Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Mei 2025 telah dilaksanakan Lokakarya Konsultasi Publik Menuju Pengelolaan Bentang Lahan Berkelanjutan Kabupaten Bone untuk memberikan masukan terhadap Rencana Pengelolaan Bentang Lahan Tingkat Sub-Bentang Lahan di Kabupaten Bone yang akan dilakukan pada enam sub-lanskap, secara tatap muka di Hotel Helios, Watampone, Kabupaten Bone.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bone, Bapak H. A. Yusuf, S.IP., MH, dan dimoderatori oleh Dr. Suyanto, yang dihadiri oleh perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Bentang Lahan Kabupaten Bone, perwakilan parapihak di Kabupaten Bone serta enam sub-bentang lahan dan ICRAF Indonesia.

Adapun hasil pembahasan dan kesepakatan dari rapat tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Rencana Pengelolaan Bentang Lahan Tingkat Sub-Bentang Lahan di Kabupaten Bone disusun secara bersama-sama oleh Pokja Bentang lahan dan para pihak di masing-masing sub-bentang lahan. Rencana pengelolaan pada tingkat sub-bentang lahan berupaya mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, yaitu SDA dan lingkungan dijaga dan dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang.
2. Pada 5-6 Agustus 2024 telah dilaksanakan Lokakarya 1 untuk membahas visi, strategi, intervensi dan aktivitas dalam pengelolaan bentang lahan berkelanjutan tingkat sub-lanskap pada enam sub-lanskap.
3. Pada 5-6 November 2024 telah dilaksanakan Lokakarya 2 terkait peran dan tata waktu tingkat sub-lanskap pada enam sub-lanskap.
4. Pada hari ini telah disepakati hal-hal yang tercantum dalam lampiran.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak telah menyetujui dan berkomitmen untuk mendukung penyusunan Rencana Pengelolaan Bentang Lahan Tingkat Sub-Bentang Lahan di Kabupaten Bone.

Watampone, 28 Mei 2025

Menyepakati,

No	Nama	Jabatan dan Instansi	Tanda tangan
1.	SULFADIANTO	KASI PAD / KEC. PATIMPENG	
2.	H. Ikhwan Dj	Kabid KDKP/ Kelapang	
3	HJ. KURRAYA	KASI PPH / KPH CENRANA	
4.	Chairil Anis.	Ka. UPT	
5	ABDUL MAKIS	KADES	
6.	Nurhaedah	Fungsional Pekerja sosial/PP3A	
7	Suwardiono	Kasprog Dinas Perikan	
8.	NURHIDAYAH	KET. KEL	
9.	HILMAWATI	KADES	
10	A. MAHDI	INDAS BONE	
11	RUSDIAMAN	Agro Kela TANI	

No	Nama	Jabatan dan Instansi	Tanda tangan
12	HARIADI	Sek. des	
13	ASIRAH Rasyid	Kades	
14	ABIDIN	AGT Klp TANI	
15.	ANDI AGUSTI	Lurah	
16	A. SYAMSU ALAM	KADUS	
17.	A. DWIE M. ABDUH	UNIASMAN Polhut	
18	Hasanuddin	Kabid Perlindung Pertanian	
19.	Tenri A.	Bag. Perek Setda	
20	~~Rusmin Suddin S.Hut M.Si~~	~~Sekcam Lapakrisa~~	
21	EKA NURDIANI	Ketua	
22	Muprida	pengawas koperasi	
23	Baswah	DP3A	

Rencana Pengelolaan Sublanskap Patimpeng Kahu

Bekerjasama dengan:

In partnership with Canada

LANDSCAPE ALLIANCE
CIFOR & ICRAF in action

Land4Lives
lahanuntukkehidupan.id